



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KUTAI
TIMUR TAHUN 2020**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU, DAN
PENGESAHAN ALAT BUKTI
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 2 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kutai Timur Tahun 2020

PEMOHON

- Mohammad Joesoef Alias HM. Jusuf Rizal dan Mustakim Ishak (75/PHP.BUP-XIX/2021)
- Mahyunadi dan Lulu Kinsu (91/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
- KPU Kabupaten Kutai Timur

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti (II)

**Selasa, 2 Februari 2021, Pukul 08.08 WIB – 10.20 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

**Rizki Amalia
Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Moh. Maulana
2. Nur Akifah Janur
3. Andi Ikra Rahman
4. Herman

B. Termohon Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Purnomo
2. Erlyando Saputra
3. Nofand Surya Gafilah

C. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hifdzil Alim
2. M. Misbah Datun

D. Pihak Terkait Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

Rendi Solihin

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

Anwar

F. Pemohon Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Lulu Kinsu
2. Mahyunadi

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Sururudin
2. Harli Muin
3. Franditya Utomo
4. Putu Bravo Timothy

H. Termohon Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Indra

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

Ikhwan Fahrojih

J. Pihak Terkait Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ardiansyah Sulaiman
2. Kasmidi Bulang

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Donal Fariz
2. Ahmad Irawan
3. Febri Diansyah
4. Jamil Burhan
5. Feliasialung
6. Ikhwan Syarif
7. Alungsyah
8. Zain Maulana Husein
9. Anang Nugraha

L. KPU RI:

Hasyim Asy'ari

M. Bawaslu:

1. Muhammad Rahman (Kab. Kutai Kartanegara)
2. Ali Mukid (Kab. Kutai Kartanegara)
3. Teguh Wibowo (Kab. Kutai Kartanegara)
4. Yulia Parlina (Kab. Kutai Kartanegara)
5. Andi Mappaseling (Kab. Kutai Timur)
6. Muhammad Idris (Kab. Kutai Timur)
7. Siti Ahlis Muafin (Kab. Kutai Timur)
8. Budi Wibowo (Kab. Kutai Timur)
9. Andi Yusri (Kab. Kutai Timur)
10. Ratna Dewi Pettalolo (Bawaslu RI)

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.08 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kita mulai. Bismillahirrahmanirahim wr. wb. Sidang dalam Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, baik. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada awal persidangan bahwa persidangan ini tetap menggunakan protokol kesehatan, sehingga durasinya tetap kita batasi, ya.

Oleh karena itu, saya harapkan seluruhnya, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu menyampaikan pokok-pokoknya saja. Seluruh dokumen yang tertulis sudah diterima oleh Semua Pihak. Pemohon sudah terima? Sudah, ya? Pemohon sudah terima, ya? Baik. Ha? Baru? Ya, memang baru, saya saja baru terima, masa Anda duluan, kan Hakimnya dahulu.

Ya. Karena bisa menjawab setelah Anda menyampaikan Permohonannya, kan begitu, pada sidang yang lalu.

Baik, silakan memperkenalkan diri Pemohon Perkara 75/PHP.BUP-XIX/2021.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baik, Yang Mulia. Yang menghadiri persidangan hari ini secara daring adalah saya sendiri, Yang Mulia, Moh. Maulana ... secara luring, saya sendiri Moh. Maulana dan secara daring ada ketiga rekan saya, Nur Akifah Janur, Herman, dan Andi Ikra Rahman.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara 91/PHP.BUP-XIX/2021?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim wr. wb. Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia. Hadir kami selaku Kuasa Hukum dari Pemohon 91/PHP.BUP-XIX/2021 ... Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021, H. Mahyunadi dan H. Lulu Kinsu, saya Sururudin, Yang Mulia, dan di samping kanan saya, Frandityo ... Franditya Utomo. Dan di Zoom Meeting ada Harli Muin, dan Putu Bravo Timothy, dan H. Lulu Kinsu, serta H. Mahyunadi. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Termohon Perkara 75/PHP.BUP-XIX/2021?

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 75/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir di dalam sidang hari ini, Prinsipal Bapak Purnomo, didampingi Kuasa Hukum, Hifdzil Alim. Kemudian di daring ada Prinsipal Bapak Erlyando dan Bapak Nofand, didampingi Kuasa Hukum, Misbah Datun. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Termohon 91/PHP.BUP-XIX/2021?

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Termohon 91/PHP.BUP-XIX/2021 KPU Kutai Timur saya Ikhwan Fahrojih sebagai Kuasa Hukum dan ada Bapak Muhammad Indra sebagai Komisioner KPU Kutai Timur, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait Perkara 75/PHP.BUP-XIX/2021?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini yang hadir Kuasa Hukum, saya sendiri Anwar dengan prinsi ... Prinsipal Bapak H. Rendi Solihin. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait 91/PHP.BUP-XIX/2021?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara 91/PHP.BUP-XIX/2021, hadir di ruangan, saya sendiri Donal Fariz dan sebelah kiri saya, Ahmad Irawan. Kemudian hadir secara online, Prinsipal Bapak Drs. Ardiansyah Sulaiman dan Bapak Kasmidi Bulang. Kemudian Kuasa hadir secara online, Febri Diansyah, S.H., Jamil Burhanuddin, S.H., Feliasianung ... Feliasialung, S.H., Ikhwan Syarif, Alungsyah, Zain Maulana Husein, dan Anang Nugraha, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Bawaslu Perkara 75/PHP.BUP-XIX/2021? Bawaslu Kutai Kertanegara, silakan!

16. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir secara langsung di Mahkamah, di sini, saya sendiri Ali Mukid, bersama rekan saya di belakang, Teguh Wibowo. Dan juga Ketua dan anggota Bawaslu Kutai Kertanegara, hadir juga yang lain melalui daring.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Bawaslu Kutai Timur, 91/PHP.BUP-XIX/2021?

18. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Yang hadir secara luring, saya sendiri Muhammad Idris (Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kutai Timur), bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Mas Budi

Wibowo. Kemudian secara daring di Bawaslu ada Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Pak Andi Mappaseling. Kemudian di Kutai Timur, ada Pak Andi Yusri dan Ibu Siti Ahlis Muafin secara daring, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wasalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Semua sudah, ya? Untuk Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu kalau masih ada bukti tambahan, diserahkan sekarang juga, kalau tidak ada, kita mulai. Ada bukti tambahan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ada, Yang Mulia, dari kami selaku Pemohon, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Pemohon sudah tidak ada kesempatan mengajukan bukti tambahan. Pada persidangan yang lalu, kan sudah saya sampaikan. Bahwa Saudara batas waktunya pada waktu persidangan yang terakhir, sebelum saya tutup persidangan yang lalu, itu sudah saya katakan, "Bukti tambahan segera diserahkan." Ya, tidak bisa lagi, ya?

Dalam hukum acara, kalau perkara ini berlanjut, maka Saudara masih bisa pada waktu pemeriksaan saksi, atau ahli, atau bukti, Anda masih bisa mengajukan tambahan. Tapi kalau tidak berlanjut, berarti sudah selesai di sini buktinya, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi sudah saya tekankan, kan? Saudara mendengarkan enggak? Kecuali sudah ada disampaikan pada sebelum persidangan ditutup, pada waktu Anda menyampaikan Permohonan, masih ada tambahan, tapi belum diverifikasi, maka pada kesempatan ini, waktu kita mengesahkan yang lain, Anda tinggal disahkan, tapi sudah diserahkan pada persidangan yang lalu, ya. Ya kan sudah berkali-kali. Jadi kalau itu disampaikan pertanyaan menjadi lucu itu. Anda tidak melihat, dan membaca, dan mendengarkan. Coba dicek risalah persidangan nanti, ya.

Baik. Ada dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu? Cukup? Ya kalau begitu sudah tidak ada lagi, ya. Begitu juga sama dengan ini, kalau

nanti akhir persidangan ... sampai akhir persidangan tidak ada bukti tambahan, berarti sudah tidak ada bukti lagi, ya. Kenapa kok saya katakan, "Pemohon tidak boleh nambah?" Karena nanti menjadi tidak adil. Karena apa? Yang bersangkutan ini pada waktu Anda ada bukti tambahan kan sudah bisa melihat pakai inzage, ya. Tapi kalau baru sekarang, berarti itu kemungkinan ada dalil baru atau bukti baru. Jadi tidak adil. Karena enggak ... mau ditanggapi sekarang, ini sudah masuk, gitu lho, ya. Itu logika hukumnya, supaya kita belajar bersama. Ya, demi kepastian hukum dan demi keadilan, ya. Ya baik, tolong dipelajari dengan baik PMK-nya.

Kita mulai dari Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021. Jadi kita bicara masalah pokok-pokoknya saja. Ini ada catatan dari Kepaniteraan, Surat Kuasa dari KPU belum masuk, tolong diserahkan. Kemudian Surat Tugas Bawaslu belum ada juga dari Kutai Timur, supaya segera dilengkapi.

Baik kita mulai saya pandu, Termohon Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021 ... oh sori, Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021. Ya, kadang-kadang 95 ... eh, 75 dibaca 95, Hakimnya sudah tua ini. Di sini yang paling muda Prof. Saldi.

Baik, apakah Saudara Termohon mengajukan Eksepsi?

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Mengajukan, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Eksepsinya apa?

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa Kewenangan Mahkamah di-Eksepsi?

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Karena menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa tidak berwenang?

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Pemohon mendalilkan soal pelanggaran administrasi pemilihan dan kode etik.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu semestinya diselesaikan bukan di Mahkamah?

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Ada di Bawaslu dan ... ya. Ada di Bawaslu dan DKPP.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Eksepsi yang kedua?

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa Kedudukan Hukum di-Eksepsi?

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Ambang batasnya tidak terpenuhi.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa tidak terpenuhi? Tidak memenuhi Pasal 158?

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Benar, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Selisihnya berapa antara Pemohon dan Pihak Terkait?

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

130.125 atau 48%.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Persentasenya berapa jadinya?

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

48%, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

40?

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

8%.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

8%. Semestinya maksimal hanya berapa?

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

1%, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

1%, baik. Ada lagi Eksepsi?

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Pasal 92 ayat (2) juncto, Pasal 10 ayat (2) PMK 6 tahun 2020, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh, apa itu?

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Seharusnya Permohonan Pemohon ditandatangani oleh presiden dan ketua, atau nama yang ... nama yang disebutkan lainnya atau sekretaris jenderal dan sebutan lainnya, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, berdasarkan Pasal 9 itu, ya?

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Betul.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ayat (2), ya?

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Ya.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa yang menandatangani Permohonan ini (...)

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Hanya presiden, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hanya presiden. Mestinya presiden dengan sekjen (...)

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Sekretarisnya.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau dengan nama lain?

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Betul, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus! Sekarang Pokok Permohonan, silakan pokok-pokoknya!

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Izin, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Membacakan Pokok Permohonan.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok-pokoknya saja jangan dibacakan, kalau dibacakan nanti selesainya hari Jumat.

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Siap, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Pokoknya, berdasarkan Berita Acara hasil pengecekan, pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan tanggal 25 Februari, Berita Acara kesimpulan hasil verifikasi administrasi tanggal 16 Maret 2020, rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan tanggal 21 Juli 2020, Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan tanggal 27 Juni 2020, Berita Acara kesimpulan hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan tanggal 4 Agustus 2020, bakal pasangan calon perseorangan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan verifikasi faktual dukungan perbaikan. Jadi dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada penjangalan terhadap calon independen menurut Termohon adalah tidak benar, tidak berdasarkan ... tidak berdasar menurut hukum.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak benar dan tidak ada bukti. Itu pada waktu proses pencalonan, ya?

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Ya, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu kan supaya bisa lebih efisien, ya.

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Ya.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya minta nanti juga yang anu ... Termohon yang berikutnya. Ada yang direspons ... termasuk Pihak Terkait, yang direspons adalah sebelum pemungutan suara, ya.

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebelum pemungutan suara itu ada proses pencalonan, ya?

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Betul, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian ada beberapa terjadi misalnya pelanggaran di dalam kampanye itu kan sebelum pencoblosan?

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Betul, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian setelah pemungutan suara. Nah, itu di dalam setelah pemungutan suara itu apa yang terjadi, ya? Terus sampai ke rekapitulasi penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, rekapitulasi di tingkat kabupaten. Apakah ada yang didalilkan dan itu direspon, ya? Supaya dibacakan pokok-pokoknya saja. Tadi sudah satu, berkenaan dengan masalah pencalonan.

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Betul, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu tidak benar dan tidak berdasar hukum. Terus yang lain?

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Pencalonan untuk partai potilik, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Menurut ... menurut Pemohon bahwa Termohon mencegah pencalonan yang dilakukan oleh partai politik atas nama Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub dan Suko Buono, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Faktanya Awang Yacoub dan Suko Buono pada awalnya diajukan oleh PKP dengan lima kursi dan PAN lima kursi. Di dalam perjalanannya DPP ... DPD PAN ... mohon izin, DPD PAN Kutai Kartanegara mengirimkan Surat Nomor PAN/20.07 dan seterusnya kepada Termohon, pada tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Supriadi sebagai ketua dan Aini Farida sebagai sekretaris. Adapun isi surat tersebut adalah untuk menyampaikan Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A dan seterusnya, tanggal 3 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Zulkifli Hasan sebagai ketua umum dan Eddy Soeparno sebagai sekretaris jenderal yang isi keputusan a quo adalah membatalkan Surat Keputusan Pencalonan Awang Yacoub dan Suko Buono sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.

Oleh karena PAN menarik dukungan, maka bakal ... maka Bakal Paslon Awang Yacoub dan Suko Buono tidak memperoleh dukungan yang cukup untuk mendaftar sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon yang menganggap Termohon tidak profesional dan tidak independen, menurut Termohon adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak berdasar menurut hukum, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kenapa kok itu begitu?

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Karena dukungannya terhadap Awang Yacoub dan Suko Buono ditarik oleh PAN, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Karena memang ada penarikan, ya?

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Betul, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Bukan berupa penjegalan?

92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Tidak.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Terkait dengan dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, hal itu saja yang berkaitan dengan Termohon, Yang Mulia, sisanya berkaitan dengan Bawaslu dan Pihak Terkait.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Yang didalilkan oleh Pemohon berkaitan dengan Termohon hanya masalah (...)

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Pencalonan.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pencalonan? Tidak ada yang lain yang berhubungan dengan DPT dan sebagainya?

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Tidak ada, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik kalau begitu. Petitumnya apa?

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabukan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara Nomor 908 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 05.15 WITA. Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin sebanyak=200.632 suara, kolom kosong=70.507 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi total suara sah di situ disebutkan, ya?

102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Benar, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Totalnya=2007 ... 271.139, ya?

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Benar, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang di ... anu, ya ... total suara sah. Baik, kalau begitu Yang Mulia Pak Manahan, ada? Cukup. Yang Mulia Prof. Saldi? Baik, silakan, Prof. Saldi.

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini ke Pemohon dulu, ya. Di Pemohon Kuasa Pemohon di Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 itu disebutkan begini, "Dalam hal pemohon diajukan oleh pemantau pemilihan," karena ini pemantau, ya? "Pemohon ditandatangani ... permohonan ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga." Bagaimana kami bisa tahu siapa presiden atau ketua umumnya itu? Keputusan apa? Anda menjadikan, enggak? Jadi apa ... jadi bukti?

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti?

108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukti berapa? Bukti berapa dia? Bukti yang diserahkan ke Mahkamah, bukti berapa? Ya, coba dimasukkan (...)

109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Saya coba verifikasi dulu buat daftar buktinya, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukti berapa? Karena begini lho, saya baca anggaran dasar Saudara itu. Jadi, "Dewan Pimpinan LIRA. Presiden LIRA, pl. Pengurus Harian LIRA, terbatas. Phlt Pengurus Harian LIRA, phl. Dewan pengurus lengkap organisasi." Nah, kami tidak punya itu sama sekali untuk bisa melihat.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada, enggak?

112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada, enggak yang itu?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Kalau di dalam daftar bukti, kami tidak memasukkan, hanya kami memiliki dokumen itu, Yang Mulia.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu. Kenapa itu ... kaya begitu tidak dijadikan bukti?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Makanya Prof. Saldi sebagai Hakim menanyakan Anda, supaya betul, enggak ini?

117. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya. Karena dalam hemat kami alwalnya, Yang Mulia, berkaitan dengan SK Lembaga Pemantau LIRA yang telah kami jadikan bukti. Menurut hemat kami, tadinya (...)

119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kan begini, kalau Anda mau beracara soal sengketa hasil pemilihan kepala daerah itu, ini detailnya, ya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Siap, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, Anda harus lihat, ada enggak ketentuan menyangkut pemantau? Ada rupanya. Kalau pemantau mau jadi pihak, ini syarat-syaratnya. Apakah dia mau jadi Pemohon, atau Pihak Terkait, atau apa punlah namanya, ini syaratnya. Nah, itu Anda baca ini, enggak?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baca.

123. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berarti, kan Anda ... ndak salah kami lagi dong?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya.

125. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu. Jadi, walaupun Anda serahkan sekarang, nanti akan dipertimbangkan oleh Hakim karena waktu Anda untuk ... apa ... untuk menyerahkan itu, kan sudah lewat. Tapi, secara faktual, kami tidak menemukan itu. Nah, itu. Karena ini menjadi bagian penting untuk

melihat posisi Saudara dalam mengajukan Permohonan ini. Karena itu juga yang dijadikan salah satu Eksepsi oleh Termohon, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Siap, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, apa yang ... apa yang ... apa yang siapnya ini?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Mohon izin, Yang Mulia. Jika diperkenankan, kami akan mengajukan bukti berkaitan dengan struktur kepengurusan.

129. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba, lihat! Coba, diambil! Ini apa, ya ... ini nanti akan dipertimbangkan oleh Hakim. Karena kami harus lihat itu, ya, Pak Ketua, ya?

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

131. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Untuk dijelaskan ke Legal Standing (...)

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sudah dianu enggak ... sterilisasi, belum?

133. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda sudah masukkan sterilisasi, enggak?

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, kan? Aduh. Itu jadi masalah.

135. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu jadi masalah.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mas, jangan dipegang dulu, Mas!

137. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, gitu.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kamu nanti masuk di sini berbahaya untuk kita itu.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Siap, Yang Mulia.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan dipegang dulu, Mas!

141. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, kita catat saja begitu, ya? Bahwa Saudara tidak menyerahkan itu. Nah, itu ... itu yang ... yang ... yang paling penting.
Terima kasih, Pak Ketua.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, itu ya? Itu nanti lain kali kalau pemantau, hal-hal semacam itu diperhatikan. Oleh karena itu, kan Anda ada kelemahan dalam Permohonan, sehingga di-Eksepsi oleh Termohon, gitu, ya? Sambil belajar kita itu, ya?

Baik, sekarang Pihak Terkait, siap?

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Siap, Yang Mulia.

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sama seperti Termohon, Anda mengajukan Eksepsi?

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Betul, Yang Mulia.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa Eksepsinya?

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Soal kewenangan, Yang Mulia.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kewenangan? Tidak berwenang? Sama dengan Termohon tadi intinya?

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Sama, Yang Mulia.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Karena Permohonannya tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara?

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Betul, Yang Mulia.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terus, yang kedua Eksepsinya mengenai?

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Legal Standing, Yang Mulia.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama? Tidak memenuhi Pasal 158?

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Pasal 158 bersama dengan (...)

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena presentasinya melebihi Pasal 158?

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Betul, Yang Mulia.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Sama dengan Pasal 9 ayat (2).

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mengenai yang tanda tangan pemantau semestinya?

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ya, benar, Yang Mulia.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, oke. Itu di halaman berapa saja, Saudara?

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Halaman 9 soal Legal Standing, Yang Mulia.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh, halaman 9, Legal Standing. Terus?

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Terus di (...)

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 9, 10, 11 itu Legal Standing, ya?

167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ya, betul, Yang Mulia.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian, yang perkara ... Anda juga mengatakan Perbaikan Permohonannya kedaluwarsa? Itu kan tidak dipakai, kan?

169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ya, betul, Yang Mulia.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus yang bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat dukungan, bagaimana? Anda ini sudah masuk Pokok Permohonan?

171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ya, betul, Yang Mulia.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang saya cek saja, itu di halaman 19. Sehingga, apa yang disampaikan oleh Termohon sudah betul tadi?

173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Betul, Yang Mulia.

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa ada bukan penjejalan, tapi memang PAN yang menarik dukungan?

175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Menarik dukungan.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga, tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon karena dukungannya tidak memenuhi persyaratan?

177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Betul, Yang Mulia.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu di halaman 19, ya, dan seterusnya, ya?

179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ya, Yang Mulia.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, apa lagi tentang Pokok Permohonan? Hal-hal yang disampaikan ... anu ... yang didalilkan mengenai janji Saudara menaikkan gaji, gimana itu? Tentang kenaikan gaji tenaga harian lepas di Kabupaten Kutai Kartanegara?

181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ya, itu di halaman 27, Yang Mulia.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 27 dan seterusnya? Itu benar, enggak?

183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Itu ndak benar, Yang Mulia.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena ini, kan Anda berarti menaikkan gaji itu dalam rangka untuk mendulang suara, kan? Betul, enggak?

185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ndak benar, Yang Mulia.

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ndak benar? Jawabannya, gimana?

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Karena kenaikan gaji THL itu di ... sudah dianggarkan sejak ... sudah dibahas sejak 27 November 2019.

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sudah dianggarkan?

189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Sudah (...)

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Artinya kalau sudah dianggarkan di APBD, berarti sebetulnya program itu bukan program mendadak, gitu?

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Bukan, Yang Mulia.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan program itu sudah disetujui oleh DPRD juga?

193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Sudah disetujui, Yang Mulia.

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, apa lagi? Politisasi birokrasi, apa yang Anda maksud ini di sini? Anda menolak ada politisasi birokrasi.

195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Jadi, tidak benar bahwa ada politisasi birokrasi berupa pengerahan ... apa (...)

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT

ASN?

197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

ASN.

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau pejabat-pejabat SKPD?

199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Pejabat-pejabat untuk melakukan kampanye ataupun mendukung Pihak Terkait, Yang Mulia.

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, itu halaman 32 dan seterusnya, ya?

201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Benar, Yang Mulia.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, mengenai dalil Pemohon yang berkenaan dengan money politics? Gimana, betul money politics?

203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ndak benar itu, Yang Mulia.

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak benar?

205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Karena (...)

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak benarnya, kenapa?

207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Adalah merupakan penjabaran dari visi-misi Pihak Terkait. Jika nantinya terpilih, akan melakukan ... memberikan bantuan kepada RT dan kepada pesantren.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu masuk dalam visi-misi?

209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ya, bukan uang kes, Yang Mulia.

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan?

211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ya.

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Nanti, Bawaslu, ya, direspons! Ada enggak laporan mengenai money politics, ya? Baik, terus, apa lagi? Itu halaman 33 dan seterusnya.

213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Benar, Yang Mulia.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, kemudian yang terakhir itu halaman 35, apa itu?

215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ini soal Pemohon melampirkan ... apa ... ada keterangan saksi yang dilampirkan dalam Permohonan, Yang Mulia.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Kami menanggapi bahwa keterangan saksi ini harus dikesampingkan karena tidak diberikan dalam ... di muka persidangan.

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, itu sampai halaman berapa itu?

219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

37, Yang Mulia.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT

37.

221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ya.

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang Petitumnya, ya!

223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ya.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Intinya bahwa dalil-dalil yang disebutkan oleh Pemohon pelanggaran yang sifatnya TSM, berarti semuanya tidak terbukti menurut Saudara?

225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Benar, Yang Mulia.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus sekarang Petitumnya!

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ya. Petitum. Bahwa uraian sebagaimana tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 908 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020.

Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang tetap benar adalah sebagai berikut.

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini saya minta konfirmasi. Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 1, itu betul sama dengan yang Termohon tetapkan tadi?

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Sama, Yang Mulia.

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama. Kemudian yang kolom kosong, benar?

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Benar, Yang Mulia.

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jumlahnya 70.507. Kemudian, total suara sah, betul?

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Betul.

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa total suara sahnya?

235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

271.139, Yang Mulia.

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama dengan Termohon, ya?

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Sama, Yang Mulia.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang ditetapkan, ya?

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Ya, Yang Mulia.

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Cukup, Yang Mulia.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau cukup, terima kasih. Sekarang Bawaslu, pokok-pokok yang menyangkut Bawaslu yang harus dijawab. Saya pandu saja.

Yang pertama, ada kesalahan dalam proses penetapan pasangan calon. Ada persoalan di situ, enggak?

243. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Baik, Yang Mulia. Dalam penetapan pasangan calon sebagaimana telah disampaikan oleh Termohon tadi, tidak terdapat persoalan, Yang Mulia.

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak terdapat persoalan, baik.
Ya, silakan!

245. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bawaslu, jangan Anda menyandarkan pendapat Anda kepada Termohon, harus pendapat Anda sendiri.

246. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Siap, Yang Mulia.

247. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya? Karena Anda itu, kan beda posisinya walaupun letaknya setelah Pemohon. Jadi, nanti Anda dikatakan bersekongkol dengan Termohon nanti, ya.

248. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Siap, Yang Mulia.

249. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Itu diperingatkan oleh Prof. Saldi Yang Mulia, ya. Jadi, silakan Anda ... kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Termohon atau Pihak Terkait, Anda juga mengatakan, "Tidak," ya.

251. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Baik, Yang Mulia.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Anda berposisi sebagai lembaga pengawas, itu harus menyampaikan yang benar, ya. Anda ... meskipun Anda tidak disumpah di sini, ini Termohon dan Pihak Bawaslu itu posisinya Anda sumpah dalam rangka melaksanakan jabatan, ya. Jadi, keterangannya keterangan di bawah sumpah itu. Berarti kalau Anda tidak jujur, tidak benar, berarti satu, dosa. Tapi dosa nanti kemudian, orang sekarang kan enggak banyak ... banyak yang enggak takut dosa. Tapi yang kedua, Anda bisa dipidana karena memberikan keterangan palsu, ya.

253. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Baik, Yang Mulia.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu masalah pencalonan, menurut Saudara tidak ada. Kemudian, yang berkaitan dengan adanya politisasi ASN dan pejabat SKPD. Anda ada enggak itu? Ini dalil utama dari Pemohon itu, ada laporan?

255. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Sebentar, Yang Mulia.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda sudah buat sendiri kok. Saya saja baca cuma enggak ada 5 menit sudah tahu isinya. Apalagi Prof. Saldi yang muda, tadi bacanya cuma 2 menit sudah tahu dia. Kalau kita yang tua 5 menit, yang tua lagi 10 menit nanti, yang membuat malah bingung.

257. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin d, angka 1, 2, 3, dan 6, dan 7 mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Maslinawati (istri petahana) pada kegiatan sosialisasi pengembangan anak usia dini.

Bahwa Bawaslu Kutai Kartanegara telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Saudara Edi Sumarlin, S.H.,

selanjutnya dilakukan penanganan ... penanganan dugaan pelanggaran atas laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak, pengumpulan alat bukti, dan membuat kajian dugaan pelanggaran, serta melakukan pembahasan pada sentra hukum terpadu, Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara. Diperoleh kesimpulan bahwa laporan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilihan dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan pelanggarannya, Bukti PK-08.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus, ada lagi?

259. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Terkait yang disinggung oleh ... Pokok Permohonan poin d, angka 3, 4, dan 5 mengenai terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Edi Damansyah dan Rendo ... Rendi Solihin pada visi-misi berupa janji pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 per RT, janji pemberian uang sebesar Rp100.000.000,00 per pesantren di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa Bawaslu Kutai Kartanegara menerangkan berdasarkan hasil pengawasan pencermatan ... menyatakan terhadap visi dan misi tidak terdapat temuan atau laporan pelanggaran pemilihan.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

261. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Berkaitan dengan ... berkaitan dengan pemberian laptop dalam Pokok Permohonan poin c angka 41 sampai 50 tentang terja ... terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Edi Damansyah dalam penggunaan program atau kegiatan pemerintah pembagi ... pembagian 1 laptop 1 RT.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan di atas, telah dilaporkan oleh Saudara Hendra Gunawan kepada Bawaslu Republik Indonesia sebagai dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di (...)

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan. Kesimpulannya, gimana?

263. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Bahwa atas rekomendasi (...)

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa pelanggaran tersebut, gimana?

265. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Bahwa pelanggaran tersebut, Bawaslu RI merekomendasikan untuk membat ... pembatalan calon.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh. Pembatalan calon?

267. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Ya, Yang Mulia.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang di mana itu? Halaman 14?

269. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Halaman 11.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 11?

271. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Halaman 11.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 11, hasil penanganan dugaan pelanggaran.

273. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Ya.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang poin berapa itu?

275. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Poin 41 sampai 50.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kok halaman 11? Kalau poin 41 sampai 50, itu halaman 13.

277. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Oh, ya.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

279. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

13, Yang Mulia.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 13, kan? Gimana ini ceritanya? Diulangi, pada poin 4! Pelanggaran yang dilak ... anu ... po ... dalil yang disampaikan oleh Pemohon berkenaan dengan poin c angka 41 sampai 50. Ini coba dibaca saja supaya ... anu ... jelas.

281. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Bahwa lebih lanjut atas perkara dugaan pelanggaran dalam hal pembagian 1 laptop 1 RT yang dilakukan oleh Edi Damansyah, telah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu RI dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, mengumpulkan bukti cukup, serta melakukan kajian hukum terhadap objek laporan. Dan berkesimpulan Terlapor atas nama Edi Damansyah yang berkedudukan sebagai Bupati Kutai Kartanegara telah melakukan tindakan menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

Terlapor atas nama Edi Damansyah yang berkedudukan sebagai Bupati Kutai Kartanegara telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan.

Terlapor atas nama Edi Damansyah yang berstatus sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati diberikan sanksi pembatalan sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan. Serta merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membatalkan Edi Damansyah sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus ... terus!

283. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Bahwa atas hasil penanganan pelanggaran ini, Bawaslu RI mengumumkan dan menyampaikan status laporan kepada Pihak Pelapor maupun Terlapor pada tanggal 11 November 2011 ... 2020.

Bahwa tindak lanjut atas ... atas hasil penanganan pelanggaran tersebut, Bawaslu RI mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU Kutai Kartanegara melalui KPU Republik Indonesia untuk membatalkan Edi Damansyah sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

285. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Bahwa atas rekomendasi hasil penanganan pelanggaran Bawaslu RI tersebut, kemudian KPU Kutai Kartanegara, melakukan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu RI ters ... terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diregister dengan Nomor Laporan 013 dan seterusnya, tanggal 4 November 2020. Namun, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan tidak terjadi pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Drs. Edi Damansyah, M.Si. Dan oleh karenanya, tidak dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini KPU, gimana ini? Kok, ternyata rekomendasinya kemudian ditindaklanjuti KPU begini? Termohon, gimana itu?

287. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Izin, Yang Mulia. Prinsipal menjelaskan.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan! Ada mik? Tolong, Petugas! Setelah dilaksanakan ... begini, sebelum dijelaskan oleh Prinsipal. Bawaslu, setelah ada rekomendasi dari Bawaslu yang mengatakan begitu dan ditindaklanjuti KPU begitu, Bawaslu apa lagi yang dilakukan? Menganggap persoalannya selesai?

289. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Bawaslu melaksa ... mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut, Yang Mulia.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus ... lho, ya. Makanya setelah dilaksanakan oleh KPU, gimana? Apa ... apa yang tindak lanjut dari Bawaslu?

291. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Setelah tindak lanjut itu, Bawaslu menerima ... menerima laporan terhadap dugaan pidana pemilihan.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, gimana? Tadi Saudara, kan menerima laporan, ada mengenai masalah pembagian laptop. Terus, Anda merekomendasikan supaya pencalonannya dibatalkan, tapi oleh KPU mengatakan, "Ini tidak ada pelanggaran." Terus setelah itu, Anda bagaimana? Menerima atau bagaimana? Diam saja habis itu?

293. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Tidak ada setelah berikutnya, Yang Mulia.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada langkah Bawaslu berikutnya, ya? Dianggap sudah selesai dan dianggap sudah menerima, begitu?

295. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Laporan tersebut dilaporkan kepada Bawaslu RI, Yang Mulia.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, terus Bawaslu RI, bagaimana sampai hari ini?

297. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Sampai hari ini tidak ada (...)

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada ... Bawaslu RI tidak melakukan apa-apa?

299. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Baik, Yang Mulia.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Prinsipal, bagaimana?

301. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua, mohon maaf, sedikit dulu.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

303. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini sebelum ke Prinsipal. Ini Kuasa Hukum di poin berapa dijelaskan di dalam jawaban Saudara soal laptop ini di jawaban Termohon? Saya mau cek ini.

304. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Di jawaban Termohon dijelaskan di halaman 48, Yang Mulia.

305. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Halaman 48, ya? Saya cek dahulu. Silakan lanjutkan dahulu dengan Prinsipal, Pak Ketua.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Prinsipal, bagaimana penjelasannya?

307. TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: PURNOMO

Terima kasih ... terima kasih. Izin, Yang Mulia.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

309. TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: PURNOMO

Menyampaikan bahwa benar pada tanggal 17 November 2020, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini Termohon, menerima surat terusan dari KPU RI yang pada isinya adalah surat rekomendasi dari Bawaslu Republik Indonesia terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Drs. Edi Damansyah sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya adalah terkait dengan pembatalan Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Setelah menerima surat itu, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini Termohon, melakukan langkah-langkah, salah satunya di halaman 48 sampai dengan halaman 52. Di situ dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Kutai Kartanegara setelah itu mengirimkan surat kepada Dirjen Otonomi Daerah terkait dengan apakah ... di halaman 49, Yang Mulia.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Atau dibacakan saja, coba!

311. TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: PURNOMO

Siap, Yang Mulia.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dibacakan saja. Bahwa dalil Pemohon yang huruf o itu.

313. TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: PURNOMO

Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan pada Bagian IV, Pokok Permohonan huruf c angka 41 sampai dengan angka 50, yang menyatakan pada pokoknya adanya fakta pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif juga dilakukan oleh Edi Damansyah (petahana) dalam penggunaan program atau kegiatan kementerian adalah program pembagian 1 laptop 1 RT. Menurut Termohon adalah tidak benar, tidak berdasarkan, dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagai berikut.

Satu. Bahwa Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 501/PL dan seterusnya, tanggal 17 November 2020 perihal Permohonan Penjelasan atau Klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Bukti T-11).

Bahwa surat ... bahwa isi surat Termohon di atas adalah berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Bawaslu RI Nomor 0705/K.Bawaslu dan seterusnya, tanggal 11 November 2020 Perihal Pengurusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU RI yang diterus ... yang diterima dan ... oleh Termohon tanggal 17 November 2020 melalui Surat KPU RI Nomor 1052/P dan seterusnya, tanggal 17 November 2020 perihal Penjelasan.

Bahwa selanjutnya, isi surat Termohon di atas adalah pada pokoknya untuk meminta penjelasan, apakah program 1 laptop 1 RT memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan? Dan apakah hal tersebut dapat dikenakan sanksi pembatalan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan?

Bahwa terhadap surat Termohon di atas, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri membalas surat Termohon dengan Surat Nomor 270/6014/Otda, tanggal 18 November 2020 Perihal Penjelasan atau Klarifikasi (Bukti T-12).

Bahwa surat direktorat jenderal ... bahwa surat Direktorat Jenderal Otda a quo berisi penjelasan sebagai berikut.

a. Bahwa keberadaan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan adalah untuk menciptakan kesetaraan perlakuan kepada para kontestan pilkada, baik kepala daerah yang mendukung kontestan, petahana, dan non-petahana agar pelaksanaan pilkada dapat dilaksanakan secara adil. Oleh karena itu, dalam pasal tersebut memuat pengaturan pembatasan kewenangan kepala daerah dan penggunaan program atau kegiatan yang berpotensi menguntungkan salah satu kontestan.

b. Terkait pelaksanaan program atau kegiatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah tertuang pada dokumen perencanaan RPJPM, RKPD, dan Renstra OPD, dan dokumen anggaran daerah KUA, PPAS dan APBD, sepanjang tidak memuat unsur kampanye, yakni ajakan secara langsung, atau tidak langsung, dan/atau perintah secara langsung atau tidak langsung yang terkait dengan kontestasi pilkada pada pelaksanaan program atau kegiatan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pelanggaran sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan. Apabila terdapat kesamaan nama penyebutan dan/atau akronim, namun dengan arti yang berbeda, serta sepanjang di dalamnya tidak ada unsur kampanye, maka hal tersebut juga tidak dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa selanjutnya Termohon pada tanggal 20 November 2020 menyampaikan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu RI terhadap pelanggaran wan ... administrasi pemilihan yang diregistrasi dengan Nomor Laporan 013/X dan seterusnya (Bukti T-13).

Bahwa dalam tindak lanjut rekomendasi Bawaslu seperti di atas, pada tanggal 17 dan tanggal 19 November 2020, Termohon mencermati dengan seksama Rekomendasi Bawaslu Nomor 075/K.Bawaslu dan seterusnya dengan melakukan hal yang sebagai berikut.

Mengirimkan surat kepada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Surat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 501 dan seterusnya.

Melaksanakan klarifikasi atau meminta keterangan kepada ... meminta keterangan pada tanggal 19 November 2020 kepada beberapa pihak sebagai berikut.

1. Ketua RT 01 Desa Batu-Batu atas nama Suparman.
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Muhammad Eriyanto.
3. Kepala Bappeda atas nama Wiyono.
4. Ketua RT 09 Desa Muara Wis atau ... atas nama Abdul Muzakir.
5. Sekretaris daerah atas nama Sunggono.
6. Ketua RT 12 Desa Muara Badak Ilir atas nama Abdul Kadir.
7. Sekretaris Kecamatan Muara Badak atas nama Rendra Badi.
8. Camat Muara Wis atas nama Riyanto.
9. Ketua RT 08 Muara Wis atas nama Ispa.
10. Kepala Desa Muara Badak Ilir atas nama Sudarman.
11. Kepala Desa Batu atas nama Basri.
12. Kepala Desa Segendang atas nama Sahdi.
13. Kepala Desa Lebak Cilong atas nama Humaidi.

Melaksanakan klarifikasi atau meminta keterangan pada tanggal 20 November 2020 kepada Drs. Sudarman, S.H., M.Si., dan menyusun kajian.

314. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, berhenti dulu, ya. Itu kan sudah diuraikan, ya, Yang Mulia.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

316. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pertanyaan saya begini, kalau dibaca surat jawaban dari Kementrian Dalam Negeri, ya ini di apa ... saya bacakan dengan baik-baik, supaya semua mendengar. Nanti saya akan ... akan bertanya kepada Bawaslu RI. Ada Bawaslu RI hadir kan? Di online? Bawaslu RI hadir, enggak?

317. BAWASLU: RATNA DEWI PETTALOLO (BAWASLU RI)

Hadir, Yang Mulia.

318. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti ... ya, nanti ada pertanyaan yang harus saya jawab ... harus saya tanyakan terkait dengan ini.

Nah, ini poin kedua di jawaban Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah itu begini, "Terkait pelaksanaan program atau kegiatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD, dan Dokumen Anggaran Daerah KUA, PPAS, dan APBD," ini ada kalimatnya, ya, ada frasanya, "Sepanjang tidak memuat unsur kampanye, yakni ajakan secara langsung atau tidak langsung ... ajakan secara langsung/tidak langsung dan/atau perintah secara langsung/tidak langsung yang terkait dengan kontestasi pilkada, maka pelaksanaan program kegiat ... atau kegiatan tersebut tidak terkait dengan kon ... apa ... tidak dimaknai sebagai bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 71."

Nah, saya ingin dapat apa ... kejelasan dari ... dari ... dari apa dulu ... dari Termohon, Anda sudah menguraikan kan unsur-unsurnya itu? Lalu unsur-unsurnya itu kemudian diundanglah pihak-pihak, ada camat, ada penda kabupaten, dan segala macamnya, juga diundang Termohon, ya, Pihak Terkait untuk menjelaskan ini. Nah, lalu Anda menyimpulkan tidak terpenuhi unsur, itu kan kesimpulannya? Sehingga kemudian berdasarkan itu Saudara mengatakan bahwa sudah melakukan tindak lanjut, sehingga dikatakan bahwa tidak memenuhi unsur, gitu kan hasil akhirnya? Ya, begitu KPU?

**319. TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021:
PURNOMO**

Ya, Yang Mulia.

320. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, sekarang pertanyaan ke Bawaslu. Mohon maaf, Pak Ketua. Bawaslu RI, bisa tersambung ke Bawaslu RI?

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Petugas tolong diarahkan ke Bawaslu RI. Ya, silakan, Prof!

322. BAWASLU: RATNA DEWI PETTALOLO (BAWASLU RI)

Siap, Yang Mulia?

323. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini ada Bu apa, ya ... Ibu Dewi, ya?

324. BAWASLU: RATNA DEWI PETTALOLO (BAWASLU RI)

Siap, Yang Mulia.

325. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bu Dewi, saya ingin dapat ketegasan Bawaslu. Ini kan ada rekomendasi Bawaslu, kemudian dilakukan telaah pada akhirnya, dikatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran. Saya ingin dapat ketegasan Bawaslu, bagaimana sifat rekomendasi ini dalam sistem atau Undang-Undang Pemilu kita?

326. BAWASLU: RATNA DEWI PETTALOLO (BAWASLU RI)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin menjawab.
Assalamualaikum wr. wb.

327. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

328. BAWASLU: RATNA DEWI PETTALOLO (BAWASLU RI)

Benar, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Bawaslu RI menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dengan Pasal 71 ayat (3). Pasal 71 ayat (3) ini memang kalau kita membaca di Undang-Undang Pemilihan masuk di Bab Kampanye. Tetapi pengaturannya berbeda dengan Pasal 69. Karena Pasal 71 ayat (3) ini secara tegas menunjuk subjeknya itu adalah gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota di larang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan dalam kurun waktu yang diatur enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih. Sehingga dugaan pelanggaran yang dilaporkan ini dalam kajian Bawaslu, kemudian melalui proses penanganan pelanggaran yang kami lakukan dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak, kami sampai pada kesimpulan memenuhi unsur pelanggaran menggunakan kewenangan yang menguntungkan calon kepala daerah.

Kemudian kami rekomendasikan kepada KPU Kutai Kartanegara melalui KPU RI. Sifat rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) yang sanksinya adalah diskualifikasi, itu adalah wajib untuk ditindaklanjuti. Karena rekomendasi kami itu adalah bukan rekomendasi dugaan pelanggaran, tetapi rekomendasi pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3), sehingga sesungguhnya tidak ada lagi kewenangan untuk melakukan penanganan sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kutai Kartanegara.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

329. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, Bawaslu memaknai wajib ditindaklanjuti itu adalah ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang direkomendasikan, begitu?

330. BAWASLU: RATNA DEWI PETTALOLO (BAWASLU RI)

Yang Mulia.

331. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, Pak Ketua, nanti kita dalam.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Saya teruskan, ya. Bu Dewi. Begini, setelah KPU tetap tidak melanjutkan rekomendasi itu, ada sikap Bawaslu yang seterusnya atau yang lain? Kan begini, setelah ada rekomendasi itu, kemudian

ditindaklanjuti oleh KPU, KPU menyatakan tidak ada ... KPU Kutai Kartanegara mengatakan itu tidak ada pelanggaran, tidak memenuhi unsur-unsur, terus berjalan terus, akhirnya terjadi pemungutan suara sampai akhir terjadi rekapitulasi, dan penetapan pasangan calon itu, ya, memperoleh suara sekian, mengalahkan kotak kosong. Bawaslu RI, atau Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kota itu ada tindakan-tindakan lain atau upaya-upaya lain juga yang dilakukan?

333. BAWASLU: RATNA DEWI PETTALOLO (BAWASLU RI)

Baik, Yang Mulia. Sebagaimana pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Pemilihan rekomen ... karena sifat wajib dari rekomendasi Bawaslu, maka ketika tidak ditindaklanjuti oleh KPU, maka akan dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena ada dugaan pelanggaran kode etik. Kami tidak melaporkan karena terhadap laporan ini juga sudah dilaporkan oleh pelapor yang menyampaikan laporan ke Bawaslu. Dan pemeriksaan di DKPP sudah dilakukan dan Bawaslu menjadi Pihak Terkait yang memberikan keterangan tentang proses penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Bawaslu.

Demikian, Yang Mulia.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Proses di DKPP sampai di mana sepengetahuan Bawaslu?

335. BAWASLU: RATNA DEWI PETTALOLO (BAWASLU RI)

Sudah sampai porses pemeriksaan, sepanjang yang saya ketahui tinggal menunggu putusan.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terima kasih.

337. BAWASLU: RATNA DEWI PETTALOLO (BAWASLU RI)

Baik, Yang Mulia.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada Prof. Saldi, mau melanjutkan. Silakan, Prof.

339. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak ke Bu Dewi lagi, tapi ini KPU RI ada enggak di sini, ya?

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU RI?

341. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

KPU RI ada, enggak?

342. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Ya.

343. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hallo?

344. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Hadir, Majelis. Saya Hasyim Asy'ari.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Pak Hasyim. Silakan, Pak Hasyim. Ini Prof. Saldi mau menanyakan sesuatu ini.

346. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Hasyim, ini ... apa namanya ... menurut ... apa namanya ... pemahaman Bawaslu tadi, rekomendasi terkait dengan Pasal 71 itu wajib dilaksanakan, tapi KPU Kabupaten Kutai ... apa (...)

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kartanegara.

348. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kartanegara itu kemudian melakukan telaah dan pada akhirnya tidak melaksanakan rekomendasi ini. Apa yang bisa menjelaskan ada

ruang bagi KPU untuk kemudian mengoreksi, "mengoreksi" ini, Pak Hasyim.

349. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi di dalam Undang-Undang Pilkada Pasal 139 ayat (1) menyatakan bahwa Bawaslu provinsi dan/atau panwaslu kabupaten/kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi pemilihan.

Ayat (2), "KPU provinsi ... KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu provinsi dan/atau panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Ini yang menjadi dasar tentang kewajiban KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

Selanjutnya di Pasal 140 ayat (1).

350. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pasal berapa?

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 140.

352. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Pasal 140.

353. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

354. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Pasal 140 ayat (1), "KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu provinsi dan/atau panwaslu kabupaten/kota diterima." Jadi, dalam pandangan KPU apa yang dilakukan KPU Kota Kutai Kartanegara itu bukan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, tetapi menindaklanjuti ... tetapi telah menjalani rekomendasi tersebut dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 140 ayat (1). Cara menindak ... cara menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu adalah dengan cara

memeriksa dan memutus karena kewenangan untuk memutus apakah seseorang atau pasangan calon itu diberikan sanksi atau tidak, kewenangannya ada di KPU.

Jadi begitu, kronologinya kira-kira begitu, Majelis. Kiranya diperkenankan

Bawaslu Pusat itu memeriksa bahwa tentang dugaan pelanggaran administrasi yang dijatuhkan oleh paslon di Kutai Kartanegara. Nah, kemudian setelah melalui kajian, disampaikan kepada KPU ... KPU Kutai Kartanegara melalui KPU Pusat. Jadi, yang menyampaikan kepada KPU Kutai Kartanegara adalah KPU Pusat. Arahan KPU Pusat melalui surat adalah sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 140 ayat (1), yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan kemudian memutus berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Diantara yang diklarifikasi adalah Kementerian Dalam Negeri, yaitu dalam hal ini Dirjen Oda melalui surat dan kemudian dijawab sebagaimana substansinya tadi diantaranya dibacakan oleh Yang Mulia Majelis. Demikian.

355. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi Pak Hasyim, saya minta ketegasan, ya. Yang pertama yang harus saya minta klarifikasi begini, meskipun rekomendasinya itu berupa pembatalan pencalonan yang dilakukan Bawaslu bersifat final, tetapi kemudian itu dilakukan kajian oleh KPU, apakah sanksi itu tetap dijalankan atau tidak dijalankan berdasarkan Pasal 139 dan Pasal 140, KPU bisa melakukan penelitian dan kalau ternyata tidak terbukti atau bukan melakukan pelanggaran, maka KPU masih tetap boleh meneruskan proses pencalonan itu, begitu, Pak Hasyim?

357. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Ya, demikian, Yang Mulia. Karena kewenangan menetapkan pasangan calon (...)

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada di KPU?

359. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Dan kemudian membatalkan pasangan calon bila terjadi pelanggaran, wewenangnya adalah di KPU.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

361. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Sebagai bentuk ... sebagai perbandingan ... izin, diperbolehkan, Yang Mulia?

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus, silakan, Pak Hasyim.

363. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Sebagai perbandingan misalkan begini, dalam hal rekomendasi sebagaimana saya sampaikan tadi, Pasal 139, Pasal 140, tetapi di sisi lain ada ketentuan tentang ... apa namanya ... produk Bawaslu yang berupa putusan karena Bawaslu ini sebagai lembaga punya dua fungsi. Yang pertama pengawasan dan kemudian itu produknya rekomendasi, ya. Yang kedua Bawaslu punya peran atau fungsi sebagai lembaga adjudikasi penyelesaian ... apa namanya ... sengketa, misalkan. Nah, ini produknya adalah vonis atau putusan.

Sebagai contoh yang baru-baru ini terjadi di Kota Bandar Lampung. Ada laporan terhadap pasangan calon, ya, yang dilakukan oleh pasangan calon yang lain, sepengetahuan saya, ke Bawaslu provinsi dengan dugaan pelanggaran TSM, Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Menurut Undang-Undang Pilkada, Pasal 135A, ditentukan bahwa yang punya wewenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran TSM itu adalah Bawaslu provinsi, bukan Bawaslu kabupaten/kota. Maka kemudian, terhadap terlapor itu yang memeriksa dan memutus adalah Bawaslu provinsi, produknya adalah vonis atau putusan karena sedang menjalankan fungsi sebagai lembaga adjudikasi.

Terhadap ini, Pasal 135 ... Pasal 135A itu juga mengatur terhadap putusan Bawaslu provinsi, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota wajib melaksanakan ... mohon maaf, saya periksa dulu, saya periksa ulang bahwasannya itu ... "Yang digunakan menindaklanjuti untuk melaksanakan." Mohon maaf, sebentar saya cek. Nah, sama Pasal 135 ayat (4), "KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu provinsi dengan menerbitkan putusan KPU provinsi atau kabupaten dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu provinsi." Nah, dalam konteks ini ... mohon maaf, ya, istilah kami suka/tidak suka, setuju/tidak setuju terhadap pemeriksaan, argumentasi, pertimbangan Bawaslu provinsi, maka terhadap putusan ini kami melaksanakan, KPU provinsi,

kabupaten/kota. In case dalam perkara Kota Bandar Lampung, KPU Bandar Lampung melaksanakan putusan Bawaslu karena statusnya adalah putusan dan memang diketentuan itu tidak ada bagaimana cara melaksanakan putusan? Enggak adanya pelaksanaan atau menindaklanjuti. Tetapi berbeda dengan pas tentang rekomendasi ... produk Bawaslu berupa rekomendasi, Pasal 140 ... 139 dengan frasa *wajib menindaklanjuti* dan kemudian Pasal 140 bagaimana cara menindaklanjutinya dengan cara membaca dan memutus.

Demikian penjelasan kami, terima kasih.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak Hasyim. Dan terima kasih tadi Bawaslu, Ibu Dewi.

365. BAWASLU: RATNA DEWI PETTALOLO (BAWASLU RI)

Izin, Yang Mulia. Jika diperkenankan?

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ada keterangan tambahan dari Bawaslu?

367. BAWASLU: RATNA DEWI PETTALOLO (BAWASLU RI)

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, silakan.

369. BAWASLU: RATNA DEWI PETTALOLO (BAWASLU RI)

Perlu kami tambahkan terkait dengan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada PKPU Nomor 25 Tahun 2013 yang menurut Bawaslu sudah tidak relevan untuk digunakan dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 karena PKPU 13 tahun ... PKPU Nomor 25 Tahun 2013 ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang digunakan untuk pelaksanaan pemilihan umum. Inilah yang sudah kami sampaikan kemarin pada persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Karena menurut kami, tindakan penanganan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena PKPU ini sebenarnya sudah tidak bisa digunakan. Demikian, Yang Mulia.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Prof. Saldi masih ada? Cukup. Yang Mulia, cukup?

Baik kalau begitu dari Bawaslu terima kasih atas keterangannya. Sekarang kita sudah menyelesaikan dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, tinggal nanti Mahkamah yang akan menilai, ya. Semuanya sudah disampaikan, kita sudah meminta klarifikasi juga kepada Bawaslu RI dan kepada KPU RI, ya.

Sekarang kita lanjutkan dengan Perkara 91/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan, yang pertama KPU.

371. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Terima kasih, Yang Mulia.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

373. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Izin menyampaikan secara singkat.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

375. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Pertama, di dalam Eksepsi. Eksepsi tentang kewenangan mengadili. Berdasarkan (...)

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana itu?

377. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Pasal 157 bahwa pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.

Menurut Termohon dalil-dalil Pemohon bukan terkait dengan hasil pemilihan, tetapi terkait dengan sengketa proses. Karena itu menurut kami, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terus?

379. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Yang kedua, tentang Kedudukan Hukum. Pada intinya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait jauh melampaui ambang batas yang ditentukan di dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b, di mana sesuai dengan jumlah penduduk bahwa selisih yang diperkenankan adalah 1,5%, sedangkan selisih antara Pemohon dengan Termohon[Sic!] itu hampir 11%, Yang Mulia.

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

381. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Yang ketiga adalah Eksepsi tentang Permohonan Pemohon Tidak Jelas. Bahwa Pemohon mendalilkan ada pencetakan KTP elektronik ganda sebanyak 20.262. Namun, Pemohon tidak menguraikan bagaimana KTP sebanyak itu digunakan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur, Yang Mulia. Bagaimana kemudian itu digunakan untuk proses pemilihan, tidak dijelaskan, tidak diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Karena itu menurut kami Permohonan Pemohon itu adalah obscuur atau tidak jelas.

Kemudian dalam Pokok Perkara. Ada beberapa pokok perkara yang didalilkan oleh Pemohon. Pertama adalah tentang pencetakan KTP-el sebanyak 20.262. Bahwa terkait dengan dalil tersebut, kami memberikan jawaban bahwa itu bukan kewenangan Termohon. Namun, tegaskan bahwa Termohon selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tidak pernah menerima keberatan terkait dengan persoalan tersebut dan tidak pernah menerima saran perbaikan atau rekomendasi dari Bawaslu Kutai Timur.

Yang kedua, tentang penggunaan KTP-el sebanyak 20.262 dalam pemungutan suara. Pertama, Pemohon tidak menjelaskan atau tidak menguraikan tentang bagaimana KTP-el tersebut digunakan dalam di

dalam proses pemungutan suara, sehingga menurut Pemohon[Sic!] dalil tersebut tidak jelas.

Yang kedua, Pemohon juga tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan penggunaan KTP-el ganda tersebut di dalam proses pemungutan suara.

Tiga tentang pembukaan 16 kotak suara (...)

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar ... sebentar. Saya lanjutkan dulu itu yang tadi.

383. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Baik, Yang Mulia.

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu ... tidak ada keberatan itu mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat pleno tidak ada keberatan?

385. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Kalau terkait dengan penggunaan ... atau terkait dengan dalil 20.262 itu tidak ada, Yang Mulia, sebagaimana kami buktikan di dalam kejadian khusus yang sudah kami lampirkan dalam alat bukti kami (...)

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Mestinya, kan itu kalau ada mengenai itu sudah muncul ada keberatan mulai di tingkat TPS, kan?

387. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Ya. Itu tidak ada, Yang Mulia.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada?

389. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Tidak ada.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

391. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Tidak ada keberatan terkait dengan itu, Yang Mulia.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Teruskan.

393. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Yang ketiga adalah tentang pembukaan 16 kotak suara yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa menurut PKPU 19/2020 Pasal 15A, memang di dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan, kotak suara itu memang harus dibuka. Jadi, tidak benar dalil Pemohon bahwa hanya ada pembukaan 16 kotak suara, tidak benar. Bahwa memang semua kotak suara itu dibuka, terutama di rekapitulasi Kecamatan Sangatta Utara.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

395. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Yang keempat adalah tentang (...)

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dibuka untuk apa ... untuk dilakukan rekapitulasi ... rekapitulasi, kan?

397. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Betul ... betul, Yang Mulia.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semua kotak suara itu yang berasal dari TPS-TPS, ya, kan?

399. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Betul, Yang Mulia.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu dibuka di tingkat kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi?

401. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Betul.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh (...)

403. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Yang dimaksud adalah demikian. Namun, dalil Pemohon, kan, menurut Pemohon hanya ada 16 pembukaan kotak suara.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

405. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Oleh karena itu, kami (...)

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Padahal mestinya ada berapa?

407. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Ada 214, Yang Mulia.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus.

409. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Lalu kemudian, dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang terdaftar di DPT kemudian tercatat kembali DPTb di Sangatta Utara itu, Yang Mulia.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

411. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Nah, terkait dengan itu, pertama, kami memberikan catatan ... memberikan jawaban bahwa tidak pernah ada keberatan dari saksi paslon terkait dengan hal itu dan dalil tersebut juga menurut Termohon juga tidak jelas, siapa atau siapa saja yang kemudian terdaftar di DPT, lalu kemudian terdaftar kembali di DPTb. Yang dimaksud Pemohon juga tidak jelas, apakah misalnya memang pemilih itu terdaftar di DPT, tapi belum menggunakan hak pilihnya, tapi kemudian menggunakan hak pilihnya di jam DPTb, misalnya begitu, juga tidak dijelaskan oleh Pemohon. Oleh karena itu (...)

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jam DPTb itu setelah jam sa ... jam 12.00 itu, ya?

413. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Ya. Nam ... namun demikian tidak dijelaskan oleh Pemohon apakah demikian (...)

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

415. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Oleh karena itu, kami tidak ... lalu kemudian, yang kelima adalah terkait dengan kesalahan penjumlahan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara. Kami sudah juga menuangkan di dalam tabel, menanggapi tabel yang disampaikan oleh Pemohon, Yang Mulia.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

417. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Kami juga menuangkan dalam bentuk tabel. Pada intinya justru tabel atau jumlah hak pilih dengan jumlah surat suara yang diajukan oleh Pemohon yang salah menjumlahkan. Dan semuanya sudah kami koreksi di dalam tabel tersebut, Yang Mulia. Jadi, kami membantah kesalahan yang didalilkan oleh Pemohon (...)

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu tabel yang halaman berapa itu? Lampirannya?

419. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Di lampiran, Yang Mulia.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di lampiran.

421. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Di lampiran, Yang Mulia, ada di dalam (...)

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang tabel 14 dan seterusnya itu lampirannya? Ya, kan?

423. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Ada di halaman (...)

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

425. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Halaman 49 (...)

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan, lampiran itu?

427. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Ya, betul, Yang Mulia.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tabel 14 dan seterusnya itu, tuh?

429. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Betul, Yang Mulia. Di (...)

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

431. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Tabel 14 dan seterusnya, ya. Jadi, pada intinya justru Pemohon yang si ... salah di dalam mejumlahkan, Yang Mulia, menurut kami, sebagaimana tabel yang kami uraikan.

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

433. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Kemudian, mengenai dalil Pemohon tentang adanya kerja sama antara Termohon dan Pihak Terkait, perlu Termohon tegaskan bahwa dalil Permohon Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon[Sic!] juga tidak menguraikan kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama dalam bentuk apa dan bagaimana, tidak pernah ada juga ... apa namanya ... pengaduan atau laporan keberatan terkait dengan hal tersebut, Yang Mulia. Jadi, demikian pokok-pokok jawaban kami, Yang Mulia (...)

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

435. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Terima kasih. Wasalamualaikum wr. wb.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Petitumnya ... Petitumnya belum disampaikan (...)

437. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Oh, baik.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo.
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 72 sekian, sekian, 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 18.17 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 benar ... 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
 - Nama Pasangan Calon, H. Mahyunadi, S.E., M.Si, dan H. Lulu Kinsu, Nomor Urut 01 perolehan suara sebanyak=55.050.
 - Awang Ferdian Hidayat dan Uce Prasetyo, Nomor Urut 02=25.289.
 - Dan Drs. Ardiansyah Sulaiman dan H. Kasmidi Bulang, Nomor Urut 3, perolehan suara sebanyak=71.797.
 - Total perolehan suara sebanyak=152.136.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Prof. Saldi, ada? Silakan.

439. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ini Kuasa Termohon?

440. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Baik.

441. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tabel itu dasarnya dari apa, ya?

442. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Ini kami dari D Hasil, Yang Mulia. Dari C-1 dan D Hasil.

443. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

C-1, ya?

444. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Terutama D Hasil.

445. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

C-1 dan hasil?

446. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Ya, D Hasil.

447. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi ini versinya Pemohon ini ... ini yang dari apa? Yang dari Termohonnya.

448. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Dari C-1 ... dari Permohonan dari C-1 salinan hasil, Yang Mulia.

449. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Kenapa tidak C-1? Dilampirkan ndak di bukti? C-1 nya? Karena ini kan begini, ini melampirkan angka ... Pemohon melampirkan angka, Anda melampirkan angka. Nah, bagaimana kami menjustifikasinya antara yang benar kalau dat ... data-datanya ini tidak dilampirkan? Sudah dilampirkan ndak?

450. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Kami lampirkan, Yang Mulia.

451. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, maksud saya ada dimasukkan bukti enggak?

452. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Kami ajukan bukti. Namun demikian begini, Yang Mulia, sesuai dengan dokumen yang kami terima secara resmi sesuai dengan PKPU, Termohon (...)

453. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, kan ... bukan ... kepentingan kami bukan sesuai dengan dokumen yang Anda terima, kepentingan kami, Mahkamah, itu data yang Anda input ke sini nih ada enggak buktinya?

454. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Ada ... ada, Yang Mulia.

455. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukti berapa? Kalau kami nanti masing-masing Anda berperkara sendiri, ini membuat perkara sendiri, enggak perlu ada kami. Jadi, Anda mengatakan angkanya itu tidak benar, nanti tiba-tiba Pemohon mengatakan, "Angka Termohon juga tidak benar." Nah, itu kan harus ada dokumen pendukung yang mendukung itu.

456. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

15, 17, Yang Mulia. 15.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT

T-15, T-16, T-17?

458. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

T-15.

459. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu dari tabel yang ada dari halaman 49 sampai 70 itu, itu bisa di cek kebenarannya di bukti berapa? T-berapa?

460. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

T-15, T,17, Yang Mulia.

461. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

T-berapa?

462. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

T-16.

463. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

T-16?

464. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

T-16, T-17.

465. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

466. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

T-18.

467. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

468. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

T-19.

469. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

470. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

T-20 dan T-21, Yang Mulia.

471. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

T-20, T-21. Oke, jadi ini nanti ada tempat untuk mengecek kebenaran klaim ini, kan?

472. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Ya.

473. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena ini kan masing-masing klaim yang harus kami buktikan.

474. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Baik, Yang Mulia.

475. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti kalau tiba-tiba kami benarkan Anda tidak ada buktinya, dikatakan kami memihak. Dibenarkan Pemohon tidak ada buktinya, dikatakan kami memihak. Jadi itu akan di cek.

476. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Baik.

477. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukti itu, satu, Pak Ketua.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini, ya?

479. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Ya, betul, Yang Mulia.

480. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang kedua, ini soal KTP yang 20.000, ya? KTP-elektronik yang 20.262, ya?

481. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Betul, Yang Mulia.

482. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, tadi Anda mengatakan, "Keberatan itu digunakan di mana? Dan bagaimana penggunaannya?"

483. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Betul.

484. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, bisa enggak Anda jelaskan lebih agak detail ini, apa maksud dari pernyataan singkat Anda itu?

485. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Kami mengurai (...)

486. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena begini lho, Pemohon itu mengatakan ini ada bukti dan sebagian sudah diserahkan ke kami, ya. Ada bukti KTP-elektronik yang dicetak itu berdekatan dengan hari pemungutan suara, jumlahnya 20.000 lebih. Jadi, kalau itu digunakan semuanya, nah itu akan

memengaruhi komposisi suara, tanpa harus ditebak ke mana perginya, kita juga enggak bisa menebak, ya? Itu orang menggunakan KTP-elektronik yang baru itu suaranya ke mana, kalau Anda menduga suaranya kan kepada Terkait ... dugaan Anda kan begitu. Kalau begitu kan pertanyaannya, kan tidak juga dipastikan.

Nah, coba Anda agak jelaskan sebagai KPU, terkait dengan KTP-elektronik yang 20.262 itu.

487. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Baik, Yang Mulia.

Yang pertama, kami juga telah melakukan inzage terhadap bukti Pemohon bahwa mengenai adanya KTP sejumlah 20.262 itu diperoleh dari surat dari dukcapil ... apa namanya ... Kemendagri, Yang Mulia.

488. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu di mana Anda uraikan di sini? Di ... di Keterangan Saudara ini? Di ... apa ... Jawaban Saudara? Halaman berapa?

489. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Di dalam uraian kami, kami hanya menyatakan bahwa itu bukan kewenangan kami soal pencetakan KTP, Yang Mulia.

490. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau pencetakannya tidak, tapi ini diduga dikaitkan dengan pemungutan suara, yang itunya harus dijelaskan.

491. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Soal bagaimana penggunaan (...)

492. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak, kalau yang ... kami di mana ini dijawab di sini?

493. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Kalau yang terkait dengan inzage tadi, kami tidak secara spesifik menjawab di sini, Yang Mulia.

494. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, Anda tidak menjawab, ya?

495. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Tid ... menjawab, kami terkait dengan pencetakan KTP-elektronik bukan kewenangan Termohon.

496. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu di mana Anda tuliskan? Jangan menjadi lawyer kalau yang berat-berat lalu dikatakan, "Tidak kewenangan," begitu. KPU juga begitu, jangan lalu menghindar untuk menjelaskan itu, padahal itu kan wilayah pekerjaan Anda juga.

Halaman berapa? Ini kalau menyangkut KTP-elektronik ini ada hubungannya dengan Undang-Undang Kependudukan dan segala macamnya. Jadi, ini agak harus hati-hati kita nanti, tidak hanya di wilayah pemilu saja.

497. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Di halaman 17, poin ke 8, Yang Mulia.

498. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 17?

499. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Ya. Pada intinya pencetakan bukan kewenangan kami, namun (...)

500. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, saya tanya (...)

501. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Yang terkait dengan (...)

502. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah Anda tunjukkan (...)

503. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Pertama, yang terkait dengan kewenangan kami adalah soal penyusunan DPT ... DPT, Yang Mulia. Sudah kami jelaskan di sini.

504. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena begini, Mas, orang datang ke tempat pemungutan suara salah satu instrumennya KTP, kan?

505. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Baik, KTP, Yang Mulia.

506. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, enggak?

507. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Yang (...)

508. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, jadi orang nanti bawa surat panggilan, lalu kemudian sampai di tempat pemungutan suara, dilihatkan KTP, lalu kalau orang tidak dapat surat panggilan juga bisa memperlihatkan KTP, dan bisa menggunakan hak pilihnya, kan?

509. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Betul, Yang Mulia.

510. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah itu, makanya itu penting dijelaskan, jangan dikatakan, "Tidak kewenangan."

511. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Ya, soal percetakannya memang kami tidak, tapi soal kaitannya dengan proses pemilihan kami sudah jelaskan, Yang Mulia.

512. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di mana itu?

513. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Di dalam ... pertama, di dalam penyusunan DPT, sudah kami jelaskan di halaman 17 (...)

514. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

17.

515. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Sampai ... sampai 28, Yang Mulia.

516. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

517. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Kami sudah uraikan bagaimana proses penyusunan DPT dan itu tidak ada yang namanya DPT ganda menurut kami, Yang Mulia. Dan sudah kami lampirkan juga bukti-buktinya.

518. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, kalau DPT ganda itu sudahlah kan itu sudah ada. Kita tanya soal KTP tadi itu. Oke sudah.

Pak Ketua, terima kasih.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya akan anu ... mulai dari.

520. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Izin, Majelis.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siapa?

522. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Hasyim.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Hasyim. Pak Hasyim gimana, Pak Hasyim?

524. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Mohon izin, Majelis. Ingin ikut membantu menjelaskan posisi jawaban. Mohon berkenan Majelis, dan juga Kuasa, dan Prinsipal KPU Kutai Timur penjelelasan tentang adanya dugaan mencetak KTP-el ganda sebanyak 20.262 sesungguhnya di dalam jawaban tertulis sudah dijelaskan, yaitu di halaman 14 dan 15 angka 33 dan angka 35. Kemudian uraiannya itu terdapat di halaman 31 angka 13 dan 32 angka 14 yang pada intinya terhadap pemilih yang menggunakan KTP-elektronik sebagaimana didalilkan Pemohon dengan ada 20.262 KTP baru itu, itu yang ditemukan penggunaannya sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Yang Mulia Prof. Saldi, yaitu mengguna ... apa namanya ... sebagai DPTb atau pemilih tambahan itu jumlahnya adalah 10.300 ... 10.356. Demikian. Saya ingin membantu menjelaskan posisi-posisi Jawaban KPU Kutai Timur. Terima kasih.

525. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Hasyim. Berarti kan ada dijelaskan, tapi kan Kuasa juga yang apa ... tadi kan saya minta di mana itu dijelaskan, ternyata ini ada di poin 13, poin 14 halaman 31 dan halaman 32. Nanti kami akan nilai, sebab kalau tidak ada penjelasan itu kan sulit

mempersandingkan dalil dengan jawaban. Begitu, ya, Pak Hasyim, ya. Nah itu yang nanti akan kami nilai. Ya Pak Ketua, ya?

Terima kasih, Pak Ketua.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

527. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Majelis.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih.

529. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Mungkin grogi dalam menghadapi Majelis.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya, silakan, Yang Mulia Manahan!

531. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mengkonfirmasi tadi jawabannya Pak Hasyim itu, adanya penggunaan DP ... DPTb, ya, yang 10.356 ini. Kalau dibandingkan dengan tempat lain misalnya, apakah penggunaan DPTb yang 10.356 ini merupakan hal yang wajar atau signifikan penggunaan yang banyak seperti itu? Nah, coba dijelaskan karena memang kita mengingat adanya KTP-el=20.262 ini digunakan 10.356, apakah ini suatu hal yang signifikan dalam penggunaan DPTb, misalnya? Karena kita tahu penggunaan DPTb, yaitu bisa menggunakan KTP elektronik bilamana dia tidak terdaftar sebagai ... di DPT. Ini apakah bisa dijelaskan Pak Hasyim? Silakan!

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Pak Hasyim!

533. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia. Pada dasarnya pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS itu ada tiga jenis.

Yang pertama adalah pemilih yang sudah terdaftar di dalam DPT. Ini dapat diprediksi jumlahnya karena nama-namanya dan berapa jumlah totalnya di setiap TPS sudah ada.

Yang kedua adalah DPPH atau pemilih masuk kategori daftar pemilih pindahan. Sesungguhnya dia sudah terdaftar di DPT, di tempat asalnya, tapi karena dia tidak bisa menggunakan hak pilih di tempat asalnya, maka kemudian dia menggunakan hak pilihnya pindah di TPS yang dituju sepanjang masih dalam satu dapil, dalam konteks ini kalau Pilkada Kutai Timur, maka TPS yang dituju masih di Kutai Timur. Ini juga bisa diprediksi jumlahnya di TPS karena untuk mengurus pindah pilih, itu maksimal tiga hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga pada hari H pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 itu sudah bisa diketahui berapa jumlah pemilih pindahan dan siapa namanya.

Kemudian yang ketiga adalah pemilih dengan kategori DPTb atau Daftar Pemilih Tambahan. Siapa pemilih yang masuk kategori DPTb adalah pemilih yang sesungguhnya yang sesungguhnya itu warga yang ada di dapil itu, dalam konteks ini Kutai Timur, telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi belum masuk atau belum terdaftar pemilih atau DPT. Sehingga sebagaimana yang pernah di putus dalam perkara PUU di MK, dan juga kemudian diakomodir dalam undang-undang, dan diatur secara teknis di PKPU, warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar di DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya (...)

534. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya sudah mengerti (...)

535. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Kemudian yang kedua, penggunaan hak pilihnya adalah di TPS sebagaimana alamat domisili di KPT. Jadi misalkan kelurahan A (...)

536. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, Pak Hasyim (...)

537. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Maka dia bisa memilih di TPS kelurahan A tersebut.

538. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih ... terima kasih, Pak Hasyim (...)

539. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Kemudian yang ketiga. Penggunaan hak pilihnya itu dengan syarat sepanjang surat suara di TPS tersebut masih tersedia. Kemudian waktunya adalah satu jam terakhir sebelum TPS ditutup, dalam hal ini adalah waktunya jam 12.00 sampai jam 13.00 waktu setempat. Sehingga pemilih dalam konteks atau yang masuk kategori DPTb itu jumlahnya tidak bisa di prediksi karena dia baru bisa hadir pada hari H, dan sangat mungkin jumlahnya sebagaimana terjadi di Kutai Timur, dan kalau menurut catatan sebagaimana disampaikan kepada KPU Kutai Timur, yaitu jumlah DPTb adalah 10 ... 10.356 itu menunjukkan bahwa surat suara di TPS yang dituju masih tersedia. Dan kalau masih tersedia berarti di TPS-TPS tersebut jumlah pemilih DPT bisa jadi tidak seluruhnya hadir. Misalkan sebagai contoh kalau pemilih DPT itu 300, kemudian jumlah surat suara yang tersedia di TPS tersebut adalah sama dengan DPT ditambah 2,5% cadangan. 2,5% dari ... 2,5% dari 300 itu 7,5, betul, ya? Kalau dibulatkan tidak mungkin ada surat suara setengah, maka dibulatkan jadi 8, maka surat suara yang tersedia 308. Misalkan surat suara tersedia 308, kemudian pemilih di DPT, di TPS tersebut yang hadir katakanlah 200 misalkan, kemudian DPPH atau pemilih pindahan itu ada lima misalkan, kemudian pemilih masuk kategori DPTb atau yang belum masuk DPT yang hadir sesaat ... pada saat pemungutan suara katakanlah ada lima, maka pemilih hadir adalah 200 dari DPT, kemudian lima dari pindahan, dan kemudian lima dari DPTb. Jadi total pemilih hadir 210.

Karena surat suara jumlahnya 308 yang hadir 210, maka surat suara masih tersedia. Kemudian sebagaimana dijelaskan pemilih tercatat dalam DPTb itu berarti di TPS itu masih tersisa surat suara. Dan pada perinsipnya walaupun belum terdaftar di DPTb ... DPT pemilih yang masuk kategori DPTb itu sebelum melakukan hak pilih harus didaftar, yaitu di dalam daftar yang namanya daftar pemilih tambahan. Supaya bisa diidentifikasi nama dan identitasnya.

Demikian, Majelis, terima kasih.

540. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Pak Hasyim. Jadi berarti walaupun di sini ada angka 10.356 ini, ini masih wajar, ya? Tidak ada yang mesti dinyatakan ataupun di situ tidak wajar, seperti itu, ya, Pak Hasyim?

541. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Demikian, Majelis. Karena tentu jumlah sekian ini kan dapat dibuktikan oleh teman-teman KPU Kutai Timur yang hadir di TPS mana saja dari (...)

542. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih.

543. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

769 TPS itu daftarnya pasti ada pemilih masuk kategori DPTb ada di TPS mana saja. Terima kasih.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Hasyim, tambahan dari saya, pertanyaan, kenapa bisa ada pemilih yang menggunakan KPT se ... sampai 10.000 lebih itu? Kenapa bisa terjadi?

545. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Kalau ini tentang ... apa namanya ... penjabarkan KTP-el, ini perlu kami jelaskan begini. Jadi ... mohon izin, Majelis, agak panjang sedikit walaupun sesungguhnya di dalam jawaban sudah secara tertulis teman-teman Kutai Timur (...)

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jawaban tertulis di halaman berapa tadi?

547. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Sudah menjelaskan. Kronologinya kira-kira begini. Yang pertama, penyusunan daftar pemilih untuk pilkada itu berasal atau sumber datanya ada dua. Yang pertama adalah DPT pemilu terakhir. Kemudian yang kedua, DP4 atau data penduduk potensial pemilih dari pemerintah atau Kemendagri. Itu kemudian disinkronisasi oleh KPU Pusat. Nah, dari situ kemudian lahirlah atau muncul lah produk yang namanya daftar pemilih. Daftar pemilih ini yang kemudian kami bagikan, kami sampaikan oleh KPU provinsi yang menyelenggarakan pilgub dan kami sampaikan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada kabupaten/kota termasuk Kutai Timur. Inilah yang jadi bahan untuk pemuktahiran data di lapangan, verifikasi faktual atau dikenal dengan cokolit, pencocokan dan penelitian yang door to door tersebut.

Nah, di dalam ... di dalam apa ... data tersebut tentu dalam apa ... cokolit, kategori yang digunakan adalah (...)

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau itu anu ... Pak Hasyim, proses itu kita sudah memahami. Tapi, apakah betul ada mobilitas penduduk yang sedemikian, Pak Hasyim?

549. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Jadi demikian, Majelis, di dalam daftar pemilih ini, saya merujuk dulu kepada ketentuan di Undang-Undang Pilkada tentang siapa saja yang mempunyai syarat sebagai pemilih. Yang pertama adalah warga negara yang berdomisili di daerah pemilihan tersebut. Yang kedua, usia 17 tahun pada hari pemungutan suara. Sebagai contoh misalkan, pemungutan suara, 9 Desember 2020, dan untuk jadi pemilih, itu adalah 17 tahun pada hari H, 9 Desember. Berarti sangat memungkinkan di dalam daftar pemilih itu, ada pemilih pemula yang ... jadi ... mohon maaf, belum 17 tahun, tapi sudah didaftar karena menurut data dari Kemendagri atau dari Dirjen Dukcapil, warga ini pada 9 Desember adalah sudah jadi pemilih, maka istilah apa ... barangnya kemudian DP4, Daftar Penduduk Potensial Pemilih.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

551. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Sementara di sisi lain menurut, Prof. Saldi, tadi ada ketentuan tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan, warga negara yang diberikan KTP itu kalau sudah 17 tahun, sehingga dalam situasi seperti ini, pemilih pemula itu belum punya KTP, maka kemudian kalau situasi seperti ini karena diantara tata cara kehadiran pemilih itu harus menunjukkan KTP (...)

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, bisa ... bisa saya mengerti, Pak Hasyim.

553. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Pemberitahuan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan hadir terhadap dirinya sendiri tidak orang lain (...)

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Hasyim. Begini, Pak Hasyim. Saya potong (...)

555. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Dan ini lah kami sampaikan kepada pemerintah. Nama-nama warga negara yang ada di dalam daftar pemilih, yang sesungguhnya sudah memenuhi syarat, tapi belum punya KTP. Inilah yang mendorong program percepatan pencetakan KTP-el itu. Demikian.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Hasyim. Begini, Pak Hasyim, saya potong, Pak Hasyim.

Berarti mobilitas itu dalam pengertian. Satu, mobilitas orang sebetulnya bertempat tinggal di kabupaten itu, tapi bekerja di lain tempat. Itu bisa terjadi. Kemudian mobilitas dari usia 16 tahun menjadi usia 70 ... eh sori, dari usia 16 tahun menjadi usia 17 tahun, sehingga kemudian dia diterbitkan KTP baru, gitu kan. Itu jumlahnya bisa jadi sedemikian rupa, itu ya? Tapi, nanti kita cek, apakah, satu, nanti kita akan anu ... Pak Hasyim, terima kasih atas penjelasannya.

557. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Ada sedikit, Majelis. Sedikit saja.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, gimana, Pak Hasyim?

559. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Ada 2 kategori kemungkinannya. Yang pertama adalah tadi, pemilih pemula yang memenuhi syarat sebagai pemilih belum punya KTP.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu mobilitas dari usia 16 ke usia 17.

561. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia tadi. Yang kedua, memang warga ini dari pemilu ke pemilu sudah ada didaftar pemilih

tetap, tapi administrasi kependudukannya belum selesai atau belum beres (...)

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

563. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Maka kemudian ini difasilitasi, kemudian dengan cetak KTP.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

565. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Demikian, terima kasih.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih.

Yang jadi masalah sekarang Pemohon, Pemohon kok bisa dapat KTP segitu banyak, itu dari mana?

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Izin, Yang Mulia, kami mendapatkan memang setelah pemilu karena kami mencurigai banyaknya warga yang mendatangi kita bahwa mereka ada ... mereka punya KTP, tapi bukan ... bukan apa ... mereka tidak meminta, mereka tidak meminta mencetak KTP, tapi mereka ada, sehingga mereka menolak, "Ini KTP saya tidak pernah mengajukan, tapi dicetak." Itu yang pertama.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, tapi itu setelah ... dia apa sudah punya KTP setelah itu diterbitkan lagi?

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Sudah, itu orang-orang tua semua, Yang Mulia. Bukan orang 16 tahun tadi jadi 17 tahun. Jadi apa yang disampaikan KPU (...)

570. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu, tunggu.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar.

572. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau ... kalau orang-orang tua juga tidak benar, lho. Anda (...)

573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Oh, siap.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu ada buktinya di situ.

575. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, kan? Kita kan lihat bukti Anda ini.

576. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Betul, Yang Mulia.

577. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau orang-orang tua, ini kayak kami ini, 50 tahun ke atas.

578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

579. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi, ini banyak yang 20 tahun. Jadi ... jadi, enggak bisa juga Anda bilang orang-orang tua semua, ya.

580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Maksud kami di atas 17 tahun, Yang Mulia, sehingga itu dalil dari si Termohon ataupun Pihak Terkait yang menyatakan bahwa adanya perpindahan itu tidak benar. Karena mereka itu memiliki KTP sebelumnya dan dari penemuan kami justru RT-RT yang ini ... yang saat pemilihan mereka memegang banyak tumpukan KTP. Jadi, ini mungkin perlu akan hadir di persidangan bahwa RT itu yang menjelaskan, mereka memiliki tumpukan dan membagi ke ... ya, mungkin, ya. Dalil kami, itu dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk (...)

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, itu nanti Anda sudah selesai itu.

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Begitu, Yang Mulia.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang kita tanya saja, jangan terlalu banyak anu.

584. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Prof? Mohon maaf, Prof.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Prof!

586. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu kan tadi kata Anda, ada orang sudah punya KTP, tiba-tiba dicetak KTP baru.

587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Betul, Yang Mulia.

588. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kan tidak mungkin juga menggunakan 2 kali pemilihan kan?

589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Betul.

590. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah.

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Mungkin yang menggunakan ini pihak lain, Yang Mulia. Bisa juga ... jadi ini tersebar. Ada orang yang memang ... kita kesulitan kalau memang itu (...)

592. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ndak, jangan terlalu melebar. Kalau yang *kita mungkin* itu sulit kita menebaknya.

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

594. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Orang yang berikan KTP kepada Anda.

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya.

596. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang tadi mengatakan, "Ini saya sudah punya KTP, tapi tiba-tiba dicetak KTP baru."

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Betul.

598. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Gitu kan yang Anda ceritakan. Itu, Anda katakan enggak, "Anda gunakan untuk memilih atau tidak?" Ditanyakan enggak?

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Saksi kami mengatakan, "Digunakan untuk memilih juga."

600. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, kalau untuk memilih kan berarti dia enggak bisa juga memilih 2 kali orang KTP-nya cuma sekali kan?

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Dia memilih di wilayah lain, Yang Mulia, izin.

602. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, dia milih 2 kali?

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, di wilayah lain. Jadi, bukan di wilayah TPS dia memilih sebelumnya. Kan, ini kan DPTb 1 jam sebelum KTP ditutup.

604. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, oke kita tinggalkan soal KTP. Anda punya bukti enggak bahwa dia menggunakan memilih di tempat lain juga?

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ada.

606. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukti berapa?

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ada, sudah dipidana, Yang Mulia.

608. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukti P berapa?

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Buktinya akan kita susulkan karena ini putusan ini adalah setelah pendaftaran ini hadir, Yang Mulia.

610. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Jadi, putusan ini ada. Jadi pada Minggu (...)

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya kira cukup, untuk ... anu ... ya, nanti kita yang menilai. KPU masih ada lagi yang akan disampaikan?

613. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Cukup, Yang Mulia.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya. Baik, kalau begitu sekarang Pihak Terkait.

615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

617. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Salam sejahtera untuk kita semua, Prof. Arief, Prof. Saldi, dan Prof. Manahan yang kami hormati. Pertama, kami selaku Pihak Terkait Perkara 91/PHP.BUP-XIX/2021 mohon izin kepada Yang Mulia untuk secara bergantian nanti dengan kolega. Secara singkat kami akan sampaikan pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait di dalam persidangan hari ini.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya ... anu, ya ... saya pandu dulu supaya lebih cepat.

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Baik, Yang Mulia.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda mengajukan Eksepsi?

621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Ya. Kita mengajukan Eksepsi terkait Legal Standing, 158, Yang Mulia.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak memenuhi, ya?

623. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Karena selisih suara Paslon 1 adalah 55.050, sementara Pihak Terkait adalah 71.797. Kalau kita baca ketentuan 158 itu adalah maksimum 1,5%, sementara secara faktual selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 10,48%, Yang Mulia.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus yang lain?

625. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Itu saja, Yang Mulia, berkaitan dengan Eksepsi.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsi?

627. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Ya.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang berkaitan dengan Pokok Permohonan?

629. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Pokok Permohonan, Yang Mulia. Pertama karena Permohonan dari Pemohon adalah heavy-nya atau beratnya kepada Pihak Terkait, maka kami akan menjelaskan satu per satu secara ringkas berkaitan dengan KTP elektronik=20.262 yang disampaikan oleh Pemohon.

Pertama, Yang Mulia, ada konsistensi ... inkonsistensi definisi. Terkadang Pemohon menggunakan istilah KTP ganda, terkadang menggunakan istilah pencetakan lebih dari sekali. Ini terminologi yang secara hukum membawa konsekuensi yang berbeda, Yang Mulia.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

631. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Yang kedua, Yang Mulia. Dalam bukti apa ... PT-6.5, kami meminta dokumen kepada Dukcapil Kutai Timur, berapa sesungguhnya KTP elektronik yang dicetak periode Juni hingga Desember 2020? Jumlahnya adalah 36.831 dan itu ada di Bukti PT-6.5, Yang Mulia.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

633. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Jadi jumlahnya lebih besar, tapi variabelnya jelas karena ada PRR (Print Ready Record), kemudian ada KTP hilang, kemudian karena perubahan data, dan pergantian suket. Yang terbanyak salah satunya adalah suket, Yang Mulia. Karena memang kita punya problem soal data pencetakan e-KTP karena blankonya itu terjadi masalah.

Yang mau kita jelaskan, Yang Mulia, seolah-olah Permohonan ini oleh Pemohon memberikan intensi Plt. Kasmidi Bulang, jadi Paslon Wakil 03 adalah plt, seolah-olah menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk melakukan pencetakan KTP elektronik ganda. Padahal, Yang Mulia, kami melampirkan di dalam bukti-bukti ada PT-5, kemudian PT-5.1, PT-6.3, bagaimana proses seluruhnya jawab jinawab dukcapil, kemudian dirjen dukcapil, sampai dengan ... apa ... Pemerintah Provinsi Kutai Timur ... Kutai apa ... Kuta yang menunjukkan bahwa ada notulensi rapat untuk mendorong terjadinya pencetakan KTP elektronik dengan kebutuhan ketertinggalan jumlah percetakan di Kabupaten Kutai Timur dan ada kepentingan untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak di 2020.

Jadi kami mau menjelaskan tidak ada intensi Pihak Terkait dengan kemauan sendiri untuk tiba-tiba mencetak KTP elektronik. Karena seluruhnya berproses melalui surat-surat yang sudah kami lampirkan di dalam bukti, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami persingkat, Yang Mulia. Kami melakukan inzage, Yang Mulia.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

635. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Terhadap kemarin di persidangan pertama ada demonstrasi KTP elektronik secara fisik yang ditunjukkan. Kami nunjuk dan kami periksa, Yang Mulia, ternyata yang diserahkan kepada Panitera hanya berupa fotokopi KTP saja. Jumlahnya adalah 129, Yang Mulia.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

637. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Kami pecah lagi secara lebih detail karena dalil pencetakan KTP elektronik secara masif oleh Pemohon itu adalah 1 Juni sampai 8 Desember 2020. Maka dari 129 kopi KTP tersebut, tahun 2012 ada satu, jadi ada juga KTP 2012 masuk, Yang Mulia. Ini berbeda tentunya dengan dalil Permohonan. Tujuh=kopi KTP 2017, 30=kopi KTP 2018, dan 24=kopi KTP 11 ... di tahun 2019. Lalu, hanya 67 KTP yang berasal di tahun 2020. Itu pun, Yang Mulia, hanya sebanyak 25 kopi KTP yang berkesesuaian dengan periode 1 Juni sampai 9 Desember 2020. Sehingga kami mempertanyakan dalil Permohonan terkait dengan hal itu.

Yang Mulia, berkaitan dengan 20.262 juga. Kami berterima kasih kepada Pemohon karena berkirim surat karena kami baca kemarin dalam buktinya, ternyata Pemohon dalam hal ini wakil paslon mengirimkan surat H. Lulu Kinsu kepada Kementerian Dalam Negeri. Dan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 47 ... 471.1/107/Dukcapil memberikan jawaban secara ringkas kami sampaikan, Yang Mulia.

Poin nomor 1 jawaban Kementerian Dalam Negeri adalah KTP elektronik yang diterbitkan oleh dinas kependudukan (...)

638. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak ... pak, itu Bukti PT berapa?

639. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Bukti PT-6.6 ... kami, Yang Mulia.

640. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukti PT-6.6, ya.

641. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Yes.

642. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar. Ini yang ditandatangani Pak Zudan, ya?

643. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Yes. Terima kasih, Yang Mulia. Kami singkat saja, poin 1, Yang Mulia. Karena Prinsipal H. Lulu Kinsu, Pemohon, bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri, lalu Kementerian Dalam Negeri memberikan jawaban. Jawaban poin 1, KTP elektronik yang diterbitkan oleh dinas kependudukan pencatatan sipil tidak ada yang terindikasi ganda dengan NIK yang berbeda dan orang yang sama. Jika penduduk merekam KTP elektronik lebih dari sekali, maka perekaman kedua dan selanjutnya tidak dapat diterbitkan KTP elektroniknya. Jadi, kami permo ... berterima kasih sekali kepada Pemohon yang sudah membantu menyediakan jawaban untuk kami terkait dengan KTP elektronik tersebut.

Yang seterusnya, Yang Mulia, sebelum kolega saya. Bahwa Pemohon mendalilkan data tidak sinkron antara jumlah perpindahan penduduk dan pencetakan KTP elektronik sebagaimana Bukti P-5 dengan mencontohkan di Kecamatan Sangatta Utara. Misalnya, pencetakan KTP elektronik sebesar 7.271 sedangkan jumlah perpindahan penduduk adalah 1.584. Cara berpikir demikian adalah keliru karena pencetakan KTP elektronik tidak hanya disebabkan karena perpindahan penduduk, melainkan karena beberapa alasan lainnya, seperti perubahan status pernikahan yang belum menikah menjadi menikah, perubahan jenis pekerjaan, KTP elektronik lama hilang, atau disebabkan karena rusak. Jadi, variabelnya banyak sekali, tapi kemudian di-framing hanya seolah-olah dengan jumlah yang pindah saja.

Selanjutnya akan dilanjutkan kolega saya, Yang Mulia, secara lebih detail menjawab jumlah-jumlah karena kami membaca secara detail data C Hasil, ada markup DPTb di dalam Permohon. Terima kasih, Yang Mulia.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

645. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Terima kasih banyak, Yang Mulia, atas perkenannya. Kami mul ... kami menjawab dalil Pemohon ini secara head to head, Yang Mulia. Karena ada angka-angka yang di situ, sehingga kita harus presisi juga, Yang Mulia.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

647. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Terkait dengan perolehan suara seharusnya oleh Pemohon di dalam dalil itu sebenarnya, Yang Mulia, itu tertulis 20.261, bukan 20.262 seperti yang kita diskusikan ini.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

649. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Sehingga paling pertama yang dijawab oleh Pihak Terkait adalah yang sebenarnya yang dimaksud itu 20.262 atau 20.261? Meskipun hanya selisih 1, Yang Mulia. Karena di dalam dalil itu 20.261.

Yang kedua, Yang Mulia, kami ingin menjawab atau menerangkan bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh Pemohon itu adalah mengurangi suara Pihak Terkait dari 20.261 atau menjadi variabel penambah. Jadi, kalau Pemohon itu seperti itu dalam dalilnya. Jadi jumlah KTP itu mau jadi pengurang, mau juga untuk diakumulasi sebagai suara Pemohon, sehingga kami mengatakan bahwa dalil tersebut tidak jelas karena tidak ada dasar hukumnya.

Terus, Yang Mulia, terkait dengan ... kaitannya dengan penggunaan KTP elektronik ganda dalam proses pemungutan suara. Sebenarnya sederhana, Yang Mulia. Kalau pencetakan KTP elektronik ini dijadikan akar dalil atau logis bahwa suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon ekuivalen dengan jumlah penggunaan e-KTP, maka seharusnya ... maka seharusnya, Yang Mulia, jumlah KTP elektronik yang dicetak itu harus sama dengan jumlah DPTb dan sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Jadi, sama antara jumlah KTP elektronik

yang dicetak, sama dengan jumlah selisih, sama dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb.

Nah, ternyata ketika kita lihat untuk ketiganya, misalnya di ... yang pertama adalah di Sangatta Utara ... kita lihat Sangatta Utara, Yang Mulia, halaman 22 ... Sangatta Utara, halaman 22, Pemohon mengatakan, "Pencetakan KTP elektronik di Sangatta Utara=7.271." Setelah kita cek, ternyata selisih keunggulan adalah 9.214 suara. Maka seharusnya, kalau sebab selisih suara itu adalah karena pencetakan KTP elektronik, maka seharusnya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait ada 7.271.

Nah, jika kita kaitkan dengan pengguna DPTb di Sangatta Utara, yang tadi katanya KTP elektronik yang dicetak ada 7.271, ternyata jumlah DPTb di sana itu hanya 5.756. Jadi, enggak nyambung, Yang Mulia. Sehingga dalil ini kami pikir, ya, memang selain tidak logis, ya, memang khayalan-khayalan saja. Kenapa ... karena seharusnya data tersebut tertuan dalam C-1 maupun D Hasil Kecamatan. Di situ, Yang Mulia, juga bisa melihat C-1 dan bisa juga melihat di D Hasil Kecamatan, hal mana data penggunaan KTP tertuang semuanya dalam ... di situ ... di dalam kobo ... kolom data pengguna hak pilih ada DPPH, ada DPT, ada DPTb, dan ada DPPH. Itu, Yang Mulia.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu yang mengenai ... anu ... sebentar saya potong.

651. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Sangatta ... Sangatta Utara. Baik.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya potong, ya?

653. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Ya.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berkenaan dengan e-KTP dan sebagainya, saya kira sudah cukup itu penjelasan, kita sudah menangkap seluruhnya.

655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Baik, Yang Mulia.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara. Terus kalau mengenai dalil yang lain?

657. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Kalau begitu, Yang Mulia, saya enggak usah membacakan kecamatan lainnya, ya, artinya, Yang Mulia, juga sudah memahami.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu tidak usah dibacakan. Mengerti, ya.

659. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Logikanya, Yang Mulia. Nah, terus tabel-tabel, Yang Mulia, kami ... kami menggunakan basis data C-1 telah kami sampaikan semua alat buktinya itu juga angka yang diambil oleh Pemohon mengarang-ngarang, Yang Mulia.

Ada polanya kami sampaikan dalam keterangan kami dan paling ... yang paling penting dari tabel yang dimuat oleh Pemohon, itu tabelnya membandingkan data pengguna hak pilih dengan data pengguna hak pilih, tapi kami dengan segala keyakinan kami, meluruskan, mungkin yang dimaksud adalah menggunakan data pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, dan menggunakan basis C-1, ya, kami juga telah menemukan ada tabel, Yang Mulia, tabel 57 TPS dan tabel 160 TPS, yang pasti bahwa jumlah antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan itu telah sesuai, tidak ada bedanya, Yang Mulia.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

661. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Nah, Pemohon berbeda karena itu mencampur-baur ... mencampur adukan antara DPT, DPPH, dan kemudian DPTb, begitu juga dengan surat suara. Jadi, angka itu dicuplik saja, Yang Mulia. Mungkin intensinya untuk mendapat kesesuaian 20.262 itu atau ingin mendekati selisih, sehingga angka itu diambil sedemikian rupa, dicocok-cocokkan, padahal kalau pemilih ini gampang sekali, Yang Mulia, karena semua telah terdokumentasi.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Itu sudah kita (...)

663. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Terus, poin 160 TPS, kami juga mengatakan bahwa itu sama, Yang Mulia. Pemohon mengambil dari ... dari data-data kami juga telah membuat polanya, kami sudah serahkan ke Yang Mulia, tabelnya juga telah kami buat.

Yang pasti bahwa untuk total, Yang Mulia, setelah kita melakukan pencermatan, contoh mereka mengatakan, "Terdapat pengguna hak pilih=37.566," itu enggak mungkin, Yang Mulia. Karena berdasarkan C-1 itu hanya 21.000 ... 29.000, begitu juga dengan surat suara.

Memang enggak ... enggak mungkin cocok karena angkanya tidak berdasarkan dokumen pemilu. Nah, itu, Yang Mulia, juga bisa memeriksanya, Yang Mulia.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

665. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Terus, saya kira itu saja, Yang Mulia, terkait dengan ... apa ... KTP dan seterusnya.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang KTP dan seterusnya itu dianggap dibacakan.

667. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Dianggap dibacakan, Yang Mulia, termasuk tabel-tabelnya. Terima kasih, Yang Mulia.

668. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Kami tambahkan untuk ke masuk dalil-dalil lain yang berkaitan dengan mutasi atau penggantian pejabat lingkungan Pemkab Kutai Timur di masa cuti.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu ... itu kita sudah baca dan semuanya sudah dimengerti.

670. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Intinya (...)

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu 53 dan seterusnya itu ... halaman 53 dan seterusnya juga sudah kita lihat, ya.

672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Kartu Indonesia Sehat juga sudah (...)

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

674. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Barangkali, Yang Mulia?

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

676. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Kalau Kartu Indonesia Sehat memang (...)

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Penyalahgunaan wewenang dalam program pemberian Kartu Indonesia Sehat juga ada.

678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Ya. Itu sudah, Yang Mulia.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di halaman 58.

680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Baik, Yang Mulia. Karena memang kabur, KIS itu ternyata ada 3 bentuk, KIS dari APBN, KIS dari APBD provinsi, dan KIS dari APBD kabupaten/kota.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Distribusinya juga jelas, bukan paslon yang mendistribusikan atau tim kampanye, tapi jelas PKH yang mendistribusikan.

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Nah, tim PKH juga berasal dari Kemensos.

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang yang terakhir di halaman 64, mengenai diskualifikasi berdasarkan putusan, kenapa Anda menyampaikan ini? Apa ada dalil yang mengatakan harus di diskualifikasi? Silakan itu.

686. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Yang Mulia, kita lihat di Petitemnya dia meminta Pihak Terkait untuk didiskualifikasi.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Dengan mengutip berbagai putusan MK, kami mengatakan bahwa kami telah ada di bagian Eksepsi kami bahwa tidak ada fakta dan kondisi terkait dengan pemeriksaan serta-merta waktu itu ... mengenai selisih suara kami sudah jawab.

Eksepsi yang kedua (...)

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

690. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Untuk ini, Yang Mulia, yang putusan-putusan MK sebelumnya itu tidak dapat dijadikan dasar untuk perkara ini karena ketentuan penyelesaian proses dengan hasil itu berbeda, Yang Mulia.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

692. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Kecuali yang dalam yurisprudensi 3 terakhir, Yang Mulia.

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang kalau begitu Petitemnya?

694. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Baik. Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya,
- b. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 tanggal 17 desember 2020.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Kuasa Pihak Terkait.

Sekarang yang terakhir dari Bawaslu. Dari Bawaslu tadi, ya. Adakah laporan-laporan mengenai yang berkenaan dengan penerbitan KTP elektronik yang didalilkan oleh Pemohon? Silakan dijawab!

696. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Baik. Assalamualaikum wr.wb. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum masuk ke laporan, Yang Mulia.

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

698. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Mohon izin menyampaikan terkait dengan proses pengawasan.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ndak usah.

700. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Siap.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Langsung saja!

702. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Baik, Yang Mulia.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang ... yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan, ya. Ini Anda menjelaskan atau memberikan keterangan, ya. Hal-hal yang berkenaan dengan KTP ganda dan sebagainya, ya, ini dianggap telah dibacakan. Sekarang yang penting, yang pengen kita mendapat konfirmasi dari Bawaslu dalam proses penerbitan KTP elektronik yang katanya ganda, adakah yang laporan-laporan yang berkenaan dengan itu dalam proses Pilkada Kabupaten Kutai Timur?

704. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Ada, Yang Mulia.

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus gimana?

706. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Ada pada poin 7 keterangan tertulis kami, Yang Mulia.

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman berapa itu?

708. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Halaman 7 sampai halaman 14, Yang Mulia.

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

710. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

PK-nya pun juga di PK-118 dan 119.

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em, gimana itu? Anda menguraikan kan masing-masing pe ... di kabupaten ... sori, di kecamatan. Ada per ... per ... anu ... perolehan suaranya? Ada yang menurut Saudara ganjil enggak waktu itu dilaporkan? Kalau pemilih yang menggunakan DPTb melebihi atau dan sebagainya itu yang berkenaan ini ada masalah?

712. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan itu masuk ke proses pengawasan kami, Yang Mulia. Di poin 3, Yang Mulia.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

714. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terkait dengan TPS 25, TPS 36, TPS 65, dan TPS 75 Desa Sangatta Utara yang menurut Pemohon terjadi perbedaan antara daftar pemilih tetap dengan DPTb, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sangatta Utara tidak terdapat kejadian khusus pada saat pleno, Yang Mulia.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada.

716. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Kemudian berdasarkan hasil pengawasan atas Formulir C Hasil Salin KWK pada keempat TPS Desa Sangatta Utara, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur merincikan bahwa TPS 25 terdapat 39 DPTb atau pemilih yang menggunakan KTP elektronik, kemudian TPS 36 terdapat 95 DPTb,

kemudian TPS 65 terdapat 146 DPTb, dan TPS 75 terdapat 77 DPTb, Yang Mulia.

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi itu wajar, ya? Enggak ada masalah?

718. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Ini berdasarkan hasil pengawasan, Yang Mulia.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi tidak ada persoalan kan?

720. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Tidak ada persoalan, Yang Mulia.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

722. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Tidak ada kejadian khusus pada saat itu, Yang Mulia.

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus!

724. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Kemudian, Yang Mulia. Di poin 4, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 25, TPS 20, TPS 18, TPS 19, TPS 24 Desa Teluk Lingga, kemudian TPS 23 Desa Swarga Bara, TPS 24, dan TPS 26 Desa Singa Gembara, serta pengawas TPS 45, TPS 35, TPS 34, dan TPS 65 Desa Sangatta Utara tidak terjadi kejadian khusus atau keberatan dari saksi pasangan calon di TPS. Demikian halnya pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara ... perolehan suara pasangan calon di tingkat Kecamatan Sangatta Utara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi pasangan calon terkait pokok aduan Pemohon yang pada intinya terjadi pemilih yang sudah masuk menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan dalam Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb, Yang Mulia.

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus yang lain!

726. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Kemudian, Yang Mulia. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon bahwa adanya KTP ganda juga terlihat dalam Formulir C Hasil Salinan KWK, yaitu adanya ketidaksinkronan antara data pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan pada sejumlah TPS di Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kombeng, Kecamatan Muaran Calong, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Karang, dan Kecamatan Telen, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dilakukan oleh pengawas TPS pada 11 kecamatan diperoleh Formulir C Hasil Salinan KWK, data pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan ditemukan perbedaan di beberapa TPS pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sangatta Utara terdapat 12 TPS, 6 TPS di Desa Sangatta Utara, 3 TPS di Desa Singa Gembara, 3 TPS di Desa Swarga Bara, dan 1 TPS di Kecamatan Teluk Pandan di Desa Sukarahmat. Namun (...)

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus kesimpulannya apa itu?

728. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Namun, perbedaan data pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan pada kedua kecamatan tersebut telah diperbaiki pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap desa kelurahan pada tingkat kecamatan, sehingga data dalam Formulir D Hasil Kecamatan KWK, kedua kecamatan dimaksud adalah sama atau tidak (...)

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Telah disesuaikan, berarti sama.

730. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Sudah disesuaikan, Yang Mulia.

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

732. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Kemudian, Yang Mulia, di poin 6, Yang Mulia, pada halaman 14 sampai dengan 27 (...)

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

734. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Di keterangan kami, Yang Mulia.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

736. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Bahwa ... terhadap Pokok Permohonan pada angka IV.3 angka 5 yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dengan terjadinya selisih. Jumlah pengguna hak pilih yang terdiri dari umlah pemilih DPT atau Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan atau DPPH, dan daftar pemilih yang menggunakan KTP elektronik atau DPTb di dalam Formulir Model ... Model C Hasil Salin KWK pada Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kombeng (...)

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dan seterusnya.

738. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Dan seterusnya, Yang Mulia.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

740. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas TPS pada 17 kecamatan yang dimaksud, pada pokoknya tidak ditemukan adanya penggunaan KTP elektronik ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Sementara terjadinya selisih jumlah pengguna hak pilih terdiri dari DPT, DPPH, dan DPTb memang ditemukan pada sembilan TPS di enam kecamatan formulir ... dalam Formulir C Salinan KWK, yaitu empat TPS di Kecamatan Sangatta Utara dan masing-masing satu TPS di Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bungalon, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Sandaran.

Akan tetapi, Yang Mulia, perbedaan selisih jumlah pengguna hak pilih tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap desa, kelurahan pada tingkat kecamatan, sehingga data dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan KWK, kelima kecamatan tersebut telah sama atau tidak terjadi perbedaan jumlah pengguna hak pilih lagi.

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

742. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Kecuali, Yang Mulia, pada Kecamatan Sandaran di TPS 3, Desa Sandaran, panwaslu kecamatan tidak mendapatkan data hasil Formulir D Hasil Kecamatan KWK dari PPK, Yang Mulia, dan hanya mendapat salinan dalam fotokopi yang buram, sehingga kami tidak bisa membacanya, Yang Mulia.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

744. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Yang Mulia, mohon izin, pada poin 7. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada angka IV.1 dan IV.2 (...)

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan. Tadi kan udah berkaitan dengan itu.

746. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Ya, siap, Yang Mulia.

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus keterangan (...)

748. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Di poin 8, Yang Mulia.

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini juga yang 8, sama itu yang sudah berkaitan dengan itu.

750. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Siap, Yang Mulia. Di poin 9, Yang Mulia. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada angka IV.4 yang pada pokoknya terkait dengan penggantian jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pertanggal 25 September 2020 oleh H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M., selaku pelaksana tugas Bupati Kutai Timur belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri secara tertulis. Atas Pokok Permohonan tersebut Saudara Munir Perdana telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan juga terdapat pelimpahan dugaan pelanggaran yang sama dari Bawaslu RI pada tanggal 17 Desember 2020 yang kemudian dilakukan penanganan pelanggaran.

Berdasarkan kajian awal laporan Saudara Munir Perdana, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil laporannya. Setelah dinyatakan lengkap Bawaslu Kabupaten Kutai Timur meregistrasi dilakukan pembahasan pertama oleh Sentral Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur dan dilanjutkan permintaan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan (...)

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, intinya saja, enggak usah dibacakan seluruhnya.

752. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Yang intinya, Yang Mulia. Pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu diputuskan bahwa tidak ditemukannya unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berdasarkan (...)

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

754. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Kemudian, Yang Mulia, terkait dengan pelimpahan yang disampaikan oleh Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan sangkaan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan Pasal Pasal 71 ayat (5), Yang Mulia, yang Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan klarifikasi sebagai Pihak Terkait, kemudian dilakukan klarifikasi yang pada intinya, Yang Mulia, bahwa pelanggaran administrasi yang dimaksudkan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur diputuskan pelanggaran pemilihan tidak memenuhi unsur pasal yang dimaksudkan. Tetapi, Yang Mulia, diduga adanya pelanggaran administrasi lainnya oleh pejabat yang bertanda tangan dan telah diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara, namun (...)

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. belum ... belum ada hasil dari BKN kan?

756. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Namun (...)

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

758. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Sampai disusunnya keterangan ini belum ada tanggapan, Yang Mulia.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tapi (...)

760. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Kemudian di poin 10, Yang Mulia.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan poin 10 itu.

762. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Baik, Yang Mulia.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Mengenai KIS tadi.

764. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Siap, Yang Mulia.

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

766. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Ada keterangan tambahan (...)

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Keterangan tambahannya apa intinya ini?

768. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Yang intinya bahwa pada saat pemilihan, Yang Mulia, kami menemukan dua pelanggaran, Yang Mulia, yang pertama terkait temuan 007 dan seterusnya. Terkait dengan pengguna Formulir C pemberitahuan atas nama orang lain untuk memilih. Pasal yang disangkakan Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10, Yang Mulia, tentang Pemilihan Gubernur dan seterusnya, dan sampai keterangan tertulis di ... kami susun, sudah berproses di pengadilan, Yang Mulia.

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

770. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Juga kami temukan di Temuan Nomor 008, Yang Mulia, penggunaan Formulir C pemberitahuan atas nama orang lain, kami sangkakan di Pasal 178A juncto Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 dan ini juga sampai keterangan ini kami susun, sudah berproses di pengadilan, Yang Mulia.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

772. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Demikian, Yang Mulia.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Ya, ini Anggota Bawaslunya Kabupaten Kutai Timur, 5 orang, ya?

774. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

5 orang, Yang Mulia.

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, oke. Terima kasih.

776. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Terima kasih, Yang Mulia.

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada, Prof. Saldi? Cukup.

Yang Mulia Pak Manahan? Cukup.

Baik kalau begitu, sudah semuanya selesai.

778. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Yang Mulia?

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waktunya melonjor 15 menit karena kita banyak diskusi tadi berkenaan kita meminta klarifikasi dari Bawaslu dan KPU.

780. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Izin, Majelis.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari mana ... Pak Hasyim, apa Pak Hasyim?

782. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Mau bertanya saja, Majelis.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pendek saja karena waktunya sudah lewat 15 menit.

784. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih. Sekira diperkenankan, Majelis. Meminta klarifikasi, meminta keterangan dari Bawaslu bahwa saya dengar tadi keterangan dari Bawaslu Kutai Timur mendapatkan limpahan perkara, dalam arti ada orang melapor ke Bawaslu Pusat kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Kutai Timur? Sementara dalam perkara yang lain di Majelis ini untuk Kutai Kartanegara yang orang melapor ke Bawaslu Pusat ditangani Bawaslu Pusat. Namun, penjelasan mengapa dalam perkara seperti itu, ada yang dikawali Bawaslu Pusat ada juga yang dilimpahkan kepada Bawaslu kabupaten? Terima kasih, Majelis.

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tidak perlu dianu ... disampaikan di sini yang berkenaan dengan apa yang harus diputus di Mahkamah nanti akan dipertimbangkan oleh Mahkamah, ya? Jadi, itu ada catatan dari Pak Hasyim nanti silakan Anda jelaskan ke sana, ya. Tapi dalam perkara ini sudah selesai, Mahkamah melihat semuanya sudah disampaikan dan akan menjadi pertimbangan, Majelis.

Baik.

786. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Izin, Yang Mulia, izin?

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari mana? Pemohon enggak ... sudah enggak boleh ngomong-ngomong apa-apa lagi?

788. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Hanya ini, bukti kami sama dengan Bawaslu, Yang Mulia, keterangan.

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang sudah, enggak usah ngomong, kita sudah tahu.

790. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah tidak ada kesempatan untuk bicara lagi, Pemohon.

792. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya? Nanti kalau ngomong lagi, saya usir keluar.

Saya malah keliru nanti malah Panitera Penggantinya yang saya usir. Baik, supaya agak santai, ya.

Baik, untuk Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021 mengajukan Bukti Termohon, T-1 sampai dengan T-13?

794. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Benar, Yang Mulia.

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait, PT-1 sampai PT-16?

796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR

Betul, Yang Mulia.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-8?

798. BAWASLU: ALI MUKID (KAB. KUTAI KARTANEGARA)

Benar, Yang Mulia.

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini semua untuk Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021 disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Kabupaten Kutai Timur, Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021, ada tambahan dari Pemohon sudah disampaikan sebelumnya, P-8, P-35, P-3 ... sampai dengan P-368.

Termohon, T-1 sampai dengan T-21, betul?

800. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Betul, Yang Mulia.

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang tadi Pemohon ada tambahan ini, betul?

802. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Betul, Yang Mulia.

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau enggak ditanya jangan ngomong, ya?
Betul P-8, P-35, P-368?

804. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Betul, Yang Mulia.

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, baik.
Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-235?

806. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD IRAWAN

Betul, Yang Mulia.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-163?

808. BAWASLU: MUHAMMAD IDRIS (KAB. KUTAI TIMUR)

Benar, Yang Mulia.

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pada Para Pihak perlu saya sampaikan bahwa persidangan pemeriksaan dalam perkara ini, semuanya sudah didengar. Ini semua akan dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang sifatnya tertutup, Saudara akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, bagaimana tindak lanjut dalam perkara ini, ya. Sesuai dengan hukum acara, kita semua akan menilai semua apa yang berkembang di dalam persidangan

ini, baik dokumen yang secara tertulis dengan bukti-buktinya dengan apa yang disampaikan secara lisan di persidangan ini, ya? Tinggal menunggu apa yang akan disampaikan Kepaniteraan hasil dari RPH ini.

Baik, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup, ya? Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.20 WIB

Jakarta, 2 Februari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

